

BAB II

INVESTASI JEPANG DI INDONESIA

FDI (*Foreign Direct Investment*) atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Ini bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (biasa disebut '*home country*') bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (biasa disebut '*host country*') baik sebagian atau seluruhnya. Caranya dengan si penanam modal membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di sana atau membeli sahamnya sekurangnya 10%.

Biasanya, FDI terkait dengan investasi aset-aset produktif, misalnya pembelian atau konstruksi sebuah pabrik, pembelian tanah, peralatan atau bangunan; atau konstruksi peralatan atau bangunan yang baru yang dilakukan oleh perusahaan asing. Penanaman kembali modal (*reinvestment*) dari pendapatan perusahaan dan penyediaan pinjaman jangka pendek dan panjang antara perusahaan induk dan perusahaan anak atau afiliasinya juga dikategorikan sebagai investasi langsung. Kini mulai muncul corak-corak baru dalam investasi seperti pemberian lisensi atas penggunaan teknologi tinggi.

Sebagian besar investasi ini merupakan kepemilikan penuh atau hampir penuh dari sebuah perusahaan. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki bersama (*joint ventures*) dan aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan lokal. *Joint ventures* yang melibatkan tiga pihak atau lebih biasanya disebut sindikasi (*syndicates*) dan biasanya dibentuk untuk proyek tertentu seperti konstruksi skala luas atau proyek pekerjaan umum yang melibatkan dan membutuhkan berbagai jenis keahlian dan sumberdaya. Istilah FDI biasanya tidak mencakup investasi asing di bursa saham.

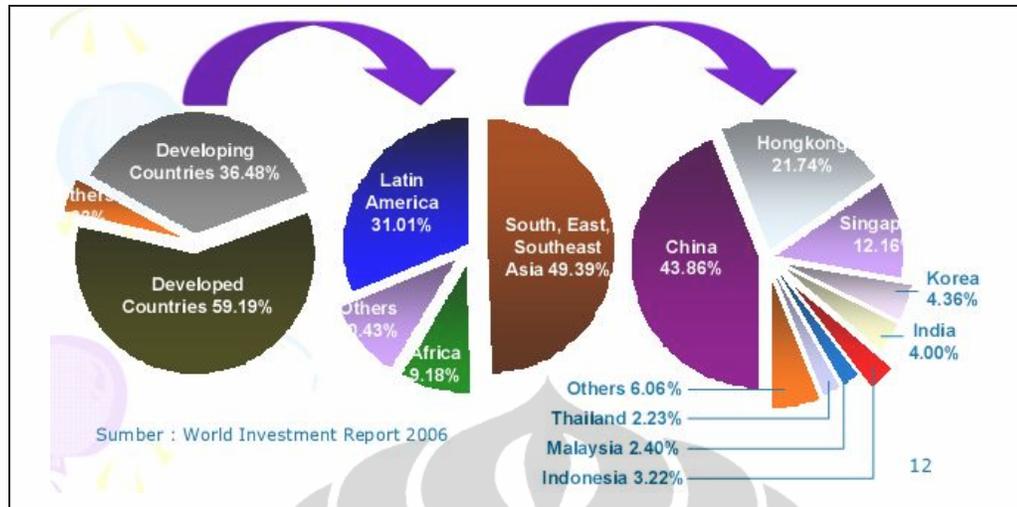
Salah satu aspek penting dari FDI adalah bahwa pemodal bisa mengontrol atau setidaknya punya pengaruh penting manajemen dan produksi dari perusahaan di luar negeri. Hal ini berbeda dari portofolio atau investasi tak langsung, dimana pemodal asing membeli saham perusahaan lokal tetapi tidak mengendalikannya

secara langsung. Biasanya juga FDI adalah komitmen jangka-panjang. Itu sebabnya FDI dianggap lebih bernilai bagi sebuah negara dibandingkan investasi jenis lain yang bisa ditarik begitu saja ketika ada muncul tanda adanya persoalan. Adapun tujuan dari penyelenggaraan FDI adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- Menciptakan lapangan kerja;
- Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi ril dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi merupakan suatu isu yang penting dalam hubungan perekonomian antar negara. Kontribusi yang dihasilkan investasi telah menjadi alasan mengapa negara investor turut berinvestasi ke negara tujuan investasi. Distribusi aliran modal asing dapat kita lihat pada gambar berikut ini:¹

¹ Nyimas Halimah Hasan, Perwakilan BKPM di London, dalam Workshop *Menjadi Duta Ekonomi Bangsa*, diselenggarakan oleh ICMI-London, 8 Juli 2007. <<http://www.icmi.or.id/ind/content/view/642/61/>> (diakses tanggal 3 Mei 2008).



Gambar II.1

Distribusi Aliran Modal Asing

Sumber: BKPM

Pada gambar terakhir, dapat kita lihat bagaimana distribusi aliran modal asing itu berjalan. Distribusi itu masuk ke Indonesia sebanyak 3,22% dari total sebanyak \$916 milyar.

Seperti halnya pada investasi Jepang ke Indonesia. Hubungan ekonomi yang terjalin pada kedua negara, khususnya pada bidang investasi menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama memiliki kepentingan dalam pengadaan investasi. Pada bab II ini akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan investasi Jepang keluar negeri beserta latar belakang dari hubungan Jepang dengan Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan masalah investasi, beserta dinamika yang terjadi sampai tahun 2006.

II.1 Jepang dan Investasi

Jepang mulai menunjukkan keberadaannya sebagai salah satu investor utama dunia pada tahun 1950an. Ini berlangsung hingga tahun 1960an dengan skala investasi yang terbatas. Hal tersebut terjadi dikarenakan oleh dua hal, yaitu:²

1.

Hancurnya sumber manajerial perusahaan-perusahaan pada masa Perang Dunia

² Sekiguchi, Sueko. *Japanese Direct Foreign Investment*. USA: Publications Press, Inc., 1979. hlm. 7-9.

II. Selanjutnya di tahun 1945-1960an Jepang berusaha mengejar ketinggalan industrinya dengan mengimpor teknologinya serta mencari pinjaman modal kepada negara lain sebagai usaha untuk membangun kembali perekonomiannya.

2. Jepang baru mampu menyerap tenaga kerjanya secara penuh bagi lapangan pekerjaan pada tahun 1960an. Keadaan ini menimbulkan fenomena baru dimana mulai terbatasnya kuantitas tenaga kerja bagi sektor perekonomian Jepang.

Dibalik terdapatnya kedua hal tersebut, tentunya ada latar belakang ataupun alasan mengapa Jepang melakukan investasinya ke luar negeri. Pada bagian berikut akan dijabarkan mengenai penjelasan hal tersebut.

II.1.1 Latar Belakang Jepang Sebagai Negara Investor

Ekonomi Jepang menghadapi berbagai keadaan penting, yang pertama adalah ketika ekonomi Jepang memperoleh sukses dalam pertumbuhan yang cepat dibidang industri berat dan kimia tahun 1965, serta peningkatan ekspor dari tahun 1972-1973. Akan tetapi dibalik kesuksesan tersebut ternyata timbul masalah, yaitu dalam menentukan struktur industri dan perdagangan yang bagaimanakah yang harus digunakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan ekonomi.

Yang kedua adalah keberhasilan ekonomi setelah perang dunia, dimana terjadi pertumbuhan yang cepat oleh kepemimpinan yang kuat dari Amerika Serikat, dan kesuksesan melakukan liberalisasi dalam perdagangan serta pertukaran dan investasi dari kebanyakan negara-negara industri melalui *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan IMF. Melalui ini Jepang banyak memperoleh *benefit* terhadap peningkatan industrinya. Tetapi pada awal tahun 1970, keadaan ekonomi yang menyenangkan ini telah mengelilingi sistem keuangan dan perdagangan berubah menjadi tidak menentu serta terjadi kekacauan dan keadaan menjadi tidak teratur. Oleh karena itu, Jepang harus mengambil tindakan sebagai pemimpin yang positif untuk memperoleh *benefit* ataupun manfaat dari ekonomi negara-negara tetangga.

Di Indonesia sendiri pada saat itu terdapat larangan pemerintah untuk pembatasan gerak investasi Jepang. Ini pula yang menghambat perkembangan investasi Jepang. Kondisi tersebut berkaitan dengan defisitnya neraca pembayaran

Jepang yang didasari oleh faktor perhitungan ekonomi. Tetapi situasi ini berubah sejak tahun 1968 karena Jepang mulai memperlihatkan kestabilan dalam nilai surplusnya yang diikuti di tahun berikutnya dengan peningkatan pesat pada GNP-nya yang mencapai 10,8%.³

Selanjutnya, setelah adanya peningkatan tersebut, memaksa keadaan Jepang untuk melakukan investasi ke luar negeri. Hal yang dirasakan pada awalnya adalah meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat dengan terbatasnya kuantitas penggerakan tenaga kerja untuk sektor ekonomi. Segi biaya produksi di Jepang menjadi sangat tinggi dikarenakan langkanya sumber daya manusia, sehingga mau tidak mau harga sumber daya manusia juga ikut tinggi. Hal ini menyebabkan adanya pengadaaan perkembangan struktur industri dalam hal kuantitas dan biaya melalui sumber daya manusia.⁴

Hal lain yang perlu diperhatikan sebagai langkah menumbuhkan perekonomiannya adalah bahwa kondisi pertumbuhan Jepang berkaitan dengan keterbatasannya memiliki lahan. Dalam dunia industri, ketersedianya lahan yang luas sangat dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan usaha industri. Padahal, sarana kondusif atas luasnya lahan sangat terbatas di wilayah Jepang. Dataran di wilayah Jepang sangatlah kecil, karena kontur geografisnya diwarnai oleh pegunungan dan perbukitan. Jepang mempunyai banyak pegunungan, 77 diantaranya merupakan gunung berapi yang masih aktif sehingga Jepang terkenal dengan daerah yang sering dilanda gempa.⁵ Daerah pegunungan Jepang sendiri mencapai 70% dari luas wilayah keseluruhan, sehingga daratannya tidak luas sementara mayoritas penduduk tinggal di daratan.

Ketersediaan lahan daratan di Jepang sangat dibutuhkan untuk pembangunan sektor industri, tetapi masyarakatnya juga membutuhkan tempat tinggal. Lahan industripun menjadi kian terbatas. Oleh karena itulah, tingkat harga lahan Jepang menjadi sangat tinggi. Ini mengakibatkan masalah besar terhadap sektor ekonomi. Tidak hanya masalah pada lahan, tetapi juga berdampak pada biaya faktor produksi yang ikut menjadi tinggi.

³ Sekiguchi, Sueko., *op.cit.* hal. 7-8.

⁴ Arase, David. *Buying Power: The Political Economy of Japan's Foreign Aid*. London: Lynne Rienner Publishers, 1995. hlm. 206.

⁵ <http://www.pmi.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3>, (diakses pada tanggal 22 Mei 2008 pukul 23.50)

Sumber produksi menjadi masalah lain pada pengembangan industri di Jepang. Pengembangan tidak hanya memerlukan lahan yang luas tetapi juga sumber produksi. Hal ini berkaitan dengan dengan sumber daya alam. Perkembangan investasi Jepang memiliki signifikansi tinggi terhadap sumber daya alam karena Jepang tidak mempunyai ketersediaan dan juga kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan atas sumber produksinya. Jepang mau tidak mau harus mengimpor sumber daya produksi dari luar negeri. Bahannya pun beragam, antara lain minyak mentah, batu bara, *antimony*, mangan, timah, nikel, kobalt, dan bauksit dalam jumlah yang besar. Selain itu Jepang juga mengimpor banyak mineral-mineral non logam seperti brom, fosfat, garam kalsium, magnesit, nitrat beserta serat-serat alam seperti katun, wol, yang semuanya dipasok dari negara lain.⁶

Jepang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya mineral dan energi pokok lebih dari 80%.⁷ Hal ini secara tidak langsung memperlihatkan ketergantungan Jepang terhadap pasokan komoditas secara kontinuiti yang terutama dalam sektor industri dan energi. Dengan adanya keterbatasan permasalahan-permasalahan yang dimiliki Jepang seperti sumber daya alam dan manusia, seperti halnya pada lahan, menghadapkan Jepang pada situasi untuk mencari alternatif lain bagi pengadaan proses produksi atas sektor industri. Investasi ke luar negeri menjadi suatu jalan bagi Jepang untuk dapat memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Hal berikutnya yang menjadi motivasi Jepang untuk berinvestasi ke luar negeri adalah adanya tekanan ekonomi dari dunia internasional akibat lemahnya kemampuan Jepang untuk pemenuhan faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi Jepang yang pesat menjadi sebab terjadinya tekanan internasional dari negara-negara Barat seperti Amerika dan Eropa.

Hubungan perdagangan Jepang yang telah mengalami surplus dengan negara Barat telah terjadi sejak tahun 1960-an. Selanjutnya di tahun 1970-an Jepang mengalami peningkatan perdagangan yang seimbang dengan Amerika Serikat seiring dengan pengadaan langkah-langkah peningkatan perekonomian

⁶ Kyung Mo, *Hugh. Japan's Trade in Asia*. dikutip oleh Lim Hua Sing, *Peranan Jepang di Asia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 152.

⁷ Sing, Lim Hua. *Peranan Jepang di Asia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002. hlm. 154.

Asia. Akibat dari peningkatan friksi perdagangan Jepang inilah yang menimbulkan protes berbagai negara barat. Mereka menuntut Jepang untuk mengurangi tingkat perdagangan Jepang yang semakin meningkat. Tindakan yang dapat Jepang lakukan adalah mengurangi jumlah pendapatan Jepang atau mengimpor produksi dari negara barat. Selanjutnya, Jepang akhirnya cenderung memilih untuk mengurangi jumlah pendapatannya.

Jumlah pendapatan yang berusaha dikurangi oleh Jepang dilakukan dengan cara mengadakan investasi ke luar negeri. Investasi ini dilakukan melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Jepang. Kebijakan investasi Jepang sendiri mengalami perubahan dengan meliberalisasikan sektor investasi secara bertahap pada tahun 1969-1972. Dampak dari liberalisasi ini adalah menghasilkan pertumbuhan investasi Jepang dalam jumlah yang besar dengan pencapaian US\$ 3,9 milyar di tahun 1970, dimana sebelumnya pada tahun 1965 investasinya hanya sebesar US\$ 0,9 milyar. Peningkatan ini disusul dengan jumlah investasi yang lebih besar lagi yaitu US\$ 15,9 milyar di tahun 1975, yang kemudian terus meningkat di tahun-tahun berikutnya.⁸

Pada bulan September 1985 telah terjadi persidangan menteri-menteri keuangan dunia, yang disebut juga negara-negara G-5 di New York. Sidang diselenggarakan akibat telah terjadi kemelesetan nilai tukar uang antara yen (Jepang) dengan dolar (Amerika). Salah satu strategi perusahaan besar Jepang sejak nilai pertukaran yen dengan dolar Amerika dinaikkan pada tahun 1985 adalah dengan melakukan penanaman modal asing. Yaitu dengan membuka pabrik-pabrik di negara-negara asing untuk memproduksi produk-produk mereka. Nilai yen yang semakin tinggi sudah tentu akan dapat menurunkan persaingan ekspor antara perusahaan-perusahaan besar Jepang, seperti: industri automobil, barang-barang elektronik, kilang-kilang pemasangan kendaraan dan sebagainya.

Pengadaan investasi asing dapat berarti memindahkan proses produksi barang ke negara lain. Hal ini terjadi pula pada investasi Jepang. Pengurangan pendapatan Jepang memang ada dikarenakan produksi investasi Jepang tersebut juga merupakan produksi negara penerima investasi Jepang. Sehingga pada dasarnya pengurangan pendapatan tidak terjadi, tetapi hanya dialihkan atau

⁸ Siagian, Naomi. *EPA Indonesia-Jepang*. 29 November 2006. Retrieved dari: <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0611/29/eko11.html>>, (diakses tanggal 12 Juli 2008).

ditransfer ke dalam bentuk yang lain. Langkah pengurangan pendapatan dilakukan untuk dapat menyeimbangkan kekuatan perdagangan terhadap negara-negara Barat, oleh karenanya diharapkan hubungan perekonomian dengan negara Barat dapat tetap terjaga baik.

Gerakan Jepang yang terbatas untuk terus mengembangkan potensi ekonominya di negara barat memberi kesempatan pada Jepang untuk menggeser ekspansi industrinya. Pilihan beralih ke wilayah Asia, khususnya ASEAN. Keinginan Jepang untuk bekerjasama dengan negara-negara ASEAN dimulai pada tahun 1970an dengan adanya Doktrin Fukuda. Kebijakan-kebijakan ekonomi Jepang juga digencarkan sebagai wujud atas ingin ditingkatkannya perekonomian negara-negara ASEAN melalui peningkatan investasi asing oleh Jepang.

ASEAN memiliki banyak potensi sumber daya yang berkembang, antara lain sumber daya alam dan manusia sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri bagi investasi Jepang. Terlebih lagi pada wilayah Indonesia, dimana ada sumber daya alam, manusia dan potensi pasar yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi Jepang. Hal ini terus berkembang hingga tahun 1980an dengan meresponnya perusahaan Jepang untuk terus mengadakan relokasi industri keluar negeri. Oleh karenanya di tahun 1980an itulah menjadi masa awal sebagian besar perusahaan Jepang untuk meningkatkan nilai investasinya yang bertujuan sebagai strategi bersifat global, investasi berfasilitas produksi, jaringan distribusi, fasilitas atas penelitian dan pengembangan produk di berbagai kawasan di dunia.⁹ Selain itu, dalam permasalahan domestiknya, Jepang mendapat tekanan pula dari luar untuk dapat meningkatkan kemampuan perekonomiannya untuk berinvestasi ke luar negeri.

II.2 Hubungan Bilateral Indonesia Dan Jepang

Walau sejarah mencatat kisah suram penjajahan Jepang di Indonesia, kedua negara telah membina hubungan persahabatan yang sangat erat yang berlandaskan hubungan kerjasama dan pertukaran di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Hubungan persahabatan seperti ini, bukanlah sesuatu yang dapat dibangun dalam sehari saja. Di Indonesia ada sekitar

⁹ Yue, Chia Siow., *op.cit.* hal. 37.

11.000 orang Jepang, sebaliknya di Jepang terdapat lebih 24.000 orang Indonesia. Perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia berjumlah lebih dari 1000 perusahaan, di mana bekerja 300.000 orang Indonesia¹⁰.

Hubungan bilateral antar kedua Negara dibuka pada bulan April 1958 dengan penandatanganan “Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia”. Pada tahun yang sama ditandatangani pula “Perjanjian Pampasan Perang”. Hubungan Jepang-Indonesia pasca Perang Dunia Kedua dimulai dengan realisasi perjanjian Pampasan Perang sebesar US\$223 juta dalam bentuk barang dan jasa selama 12 tahun mulai 1958, ditambah US\$400 juta dalam bentuk pinjaman selama 20 tahun.¹¹ Karena barang dan jasa harus buatan Jepang, maka perusahaan-perusahaan Jepang bersaing untuk memperoleh kontrak dengan berbagai cara dengan melobi pemerintah Indonesia dan melibatkan politisi Jepang untuk mendapatkan kontrak itu.

II.2.1 Kerjasama Ekonomi Indonesia Dan Jepang

Dasar hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Jepang adalah “*Aggrement on Amityrelations and Commerce*” yang ditandatangani di Tokyo pada tanggal 1 Juli 1961.

Sedangkan untuk pembukaan jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia diadakan pada tahun 1963. Kerjasama ekonomi Jepang dengan Indonesia makin meningkat sejak awal Orde Baru 1967. Kemudian di tahun 1968, dimana neraca pembayaran Jepang mulai memperlihatkan *surplus* yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan tingkat 10,8%, mendesak Jepang untuk melaksanakan investasi ke luar negeri.

Berikut adalah data-data perdagangan dan investasi antara Indonesia-Jepang pada kurun waktu 1997-2001:¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Deplu RI., *op.cit.* hal. 25.

Tabel II.1

Trend Perdagangan Jepang dan Indonesia

		1997		1998		1999		2000		2001 (Jan-Maret)	
		Value	%	Value	%	Value	%	Value	%	Value	%
Export	Non-Oil&Gas	6,940	- 1,1	5,339	- 23,1	5,698	6,7	7,399	29,9	1,917	13,4
	Oil&Gas	5,545	- 5,5	3,777	- 31,9	4,700	24,4	7,016	49,9	1,759	23,9
	Total	12,485	- 3,1	9,116	- 27,0	10,398	14,1	14,415	38,6	3,676	18,2
Import	Non-Oil&Gas	8,232	- 3,0	4,279	- 48,0	2,899	- 32,3	5,379	85,5	1,531	58,8
	Oil&Gas	0,020	0,0	0,014	- 30,0	0,015	5,0	0,018	24,5	0,003	- 73,0
	Total	8,252	- 3,0	4,293	- 48,0	2,914	- 32,1	5,379	85,2	1,534	57,3

Value dalam US\$ milyar

Sumber data dari BPS

Tabel II.2

Trend Investasi Jepang dan Indonesia

Year	1997			1998			1999			2000			2001 (Jan-July)		
	P	I	%	P	I	%	P	I	%	P	I	%	P	I	%
New Investment	87	3,908	3,9	70	0,372	- 90,5	64	0,168	- 54,8	82	1,066	534,5			
Expansions	76	1,253	- 45,2	48	0,719	- 42,6	71	0,474	- 34,1	111	0,861	81,6			
Change of Status	7	0,260	- 83,8	8	0,240	- 7,7	6	0,002	- 99,2	11	0,027	1250,0			
Total	94	5,421	- 29,2	78	1,331	- 75,4	70	644	- 51,6	93	1,954	203,4	58	0,513	- 59,7

#P : Jumlah Proyek

#I : Nilai Investasi

#% : Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Nilai Investasi dalam US\$ milyar

Sumber data dari BKPM

Berdasarkan tabel-tabel diatas, maka data perdagangan dan investasi kedua negara adalah sebagai berikut:¹³

- (i) Neraca perdagangan antara Indonesia-Jepang selama 1997-2000 selalu menunjukkan posisi surplus bagi Indonesia. Surplus yang diraih pada tahun 2000 naik 71% dibanding tahun 1999. Sedangkan nilai ekspor Indonesia ke Jepang tahun 2000 mencapai jumlah sebesar US\$14,4 milyar.
- (ii) Neraca perdagangan dalam periode Januari-Maret 2001 menunjukkan angka positif atau surplus bagi Indonesia.
- (iii) Jepang merupakan investor terbesar sejak tahun 1967. Nilai investasi Jepang di Indonesia secara kumulatif dari tahun 1967 sampai akhir 2000 adalah 15,5% dari total investasi asing di Indonesia. Investasi Jepang sebagian besar berada dalam sektor manufaktur. Ini berarti investasi Jepang mempunyai peranan yang lebih konkrit dan berdampak langsung pada pembangunan industri Indonesia.

¹³ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. *Hambatan Dan Peluang Pemulihan Ekonomi Indonesia Melalui Kerjasama Investasi Dan Perdagangan Dengan Mitra Wicara ASEAN +3 (Cina-Jepang-Korsel*. Jakarta: Deplu RI, 2001.

Secara umum, kebijaksanaan perdagangan luar negeri Jepang diarahkan untuk memperlancar arus perdagangan (liberalisasi perdagangan), meskipun dalam prakteknya masih terdapat banyak hambatan yang ditemui untuk memasuki pasar Jepang, khususnya untuk produk pertanian dan makanan olahan. Sementara itu, keunikan keterkaitan antara investasi, dagang dan *Official Development Assistance* (ODA) senantiasa menarik perhatian. Pengaturan ODA lebih banyak difokus pada proyek-proyek yang berkaitan dengan infrastruktur seperti pembangkit tenaga listrik, jalanan, jembatan, pelabuhan, telekomunikasi dan jaringan penyiaran TV dan radio, pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan, pembangunan pertanian dan desa, peningkatan ekspor, dan belakangan ini pada bidang pemeliharaan lingkungan (*environmental protection*) yang kesemuanya memberi sumbangan besar bagi pembangunan Indonesia.

Indonesia merupakan negara penerima ODA (bantuan pembangunan tingkat pemerintah) terbesar dari Jepang (berdasarkan realisasi netto pembayaran pada tahun 2005 adalah US\$1.22 milyar, yaitu \pm 17% dari seluruh ODA yang diberikan Jepang).¹⁴ Selain itu, realisasi bantuan untuk tahun 2006 adalah:¹⁵

Tabel II.3
Realisasi ODA Tahun 2006

Pinjaman Yen	125,2 milyar yen
Bantuan Hibah	5,4 milyar yen ((berdasarkan pertukaran Nota-nota
Kerjasama Teknik	7.8 miliar Yen (berdasarkan realisasi pembiayaan JICA)

Kebijaksanaan pemerintah Jepang mengenai bantuan berupa pinjaman proyek bertujuan untuk menyempurnakan prasarana industri serta kerjasama teknik untuk mengembangkan sumber daya manusia. Bantuannya bersifat luwes sesuai dengan perkembangan kebijaksanaan ekonomi Indonesia dan sekaligus juga melalui kerjasama untuk peningkatan kebutuhan dasar pokok manusia. Bantuan seperti ini melalui kerjasama teknik dan bantuan hibah yang tidak perlu

¹⁴ *Hubungan Perekonomian Indonesia-Jepang*. <http://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco_id.html>, (diakses pada tanggal 2 Juni 2008).

¹⁵ *Ibid*

dibayar kembali. Umumnya bantuan Jepang adalah sebagai bantuan (*grants*) dan pinjaman (*loans*). Bantuan Jepang dimanajeri oleh JICA (*Japan International Cooperation Agency*), dan pinjaman diatur oleh badan lain yaitu OECF (*Overseas Economic Cooperation Fund*). Secara relatif bantuan keuangan Jepang pada Indonesia lebih nyaman bagi Indonesia dalam arti tidak terlalu mengaitkan dengan syarat- syarat politik. Berdasarkan laporan JBIC, bantuan ODA hingga tahun 2000 mencapai lebih dari 600 buah. Selama kurang lebih 30 tahun, ODA Jepang memberikan kontribusi ke berbagai bidang pembangunan. Berikut perbandingan bantuan ODA terhadap sektor sosial ekonomi:¹⁶

Tabel II.4

Distribusi ODA Terhadap Sektor Sosial Ekonomi Indonesia

Jenis Sektor	Presentase
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1,9%
Telekomunikasi	4,18%
Pertambangan dan Manufaktur	6,7%
Pelayanan Sosial	8,3%
Irigasi dan Kontrol Banjir	10,3%
Tenaga Listrik dan Gas	17,5%
Transportasi	21,9%
Pinjaman Komoditas	27,8%
Lain-lain	1,4%

Jepang menyadari kekayaan sumber daya alam Indonesia terutama sumber energi. Sebagai basis manufaktur bagi perusahaan Jepang, mereka menilai

¹⁶ *Ibid.*

Indonesia memiliki peranan yang penting dalam ukuran keamanan (*in term of security*) karena letak geografis dan jumlah penduduk sekitar 250 juta. Secara khusus Jepang menaruh perhatian khusus dengan selat Malaka dan Lombok, dua jalur pelayaran (*key waterways*) yang banyak digunakan tanker-tanker dari Timur Tengah dengan tujuan Jepang. Karena alasan khusus ini, bagi Jepang adalah sangat esensial terjalinnya hubungan yang tetap bersahabat dengan Indonesia dan stabilitas domestik Indonesia dijamin oleh Pemerintah Indonesia. Hubungan ini terbentuk dengan adanya pula ekspor-impor antar kedua negara. Mayoritas sumber daya industri Jepang harus diimpor dari luar negeri, baik migas maupun non-migas. Adanya hubungan perdagangan antara Indonesia dan Jepang dapat dilihat pula pada tabel perdagangan berikut ini:¹⁷

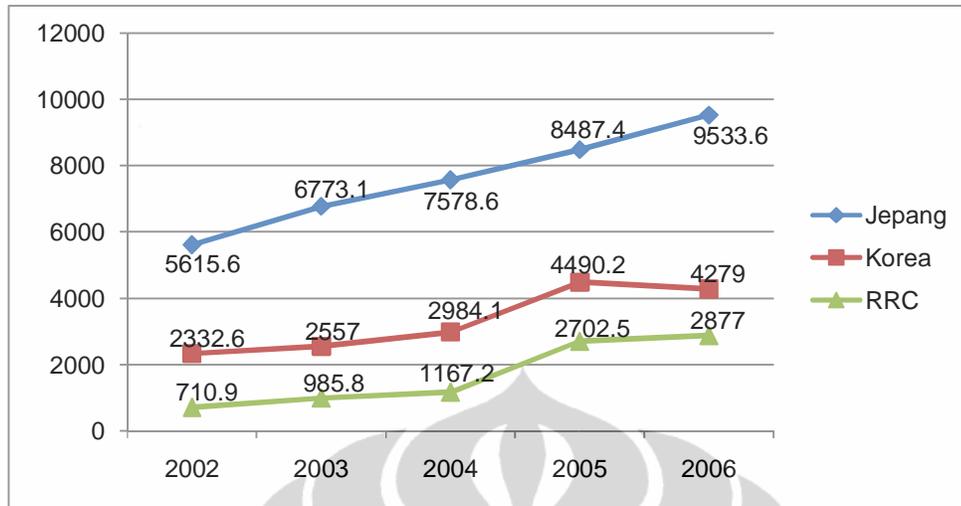
Tabel II.5

Total Ekspor Lima Besar Negara Sasaran Ekspor Indonesia (US Milyar Dolar)

Negara	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Jepang	13,0	12,0	13,6	15,9	18,0	21,7
AS	7,7	7,5	7,4	8,8	9,8	11,2
Singapura	5,3	5,3	5,4	6,0	7,8	8,9
Korea Selatan	4,1	4,1	4,3	4,8	7,1	7,7
Cina	3,1	2,9	3,8	4,6	4,6	8,3

Sumber :BPS

¹⁷ Haswidi, Andi. *EPA Offers Opportunities and Challenges*. Jakarta: *The Jakarta Post*, 20 Agustus 2007. <http://www.bilaterals.org/article.php?id_article=9396>, (diakses pada tanggal 2 Juni 2008).



Gambar II.2

Nilai Ekspor Minyak Bumi Dan Gas Menurut Negara Tujuan (Juta US \$) 2002-2006

Tabel II.6

Perkembangan Impor Non-Migas Menurut Negara Asal

NO	NEGARA	2002	2003	2004	2005	2006	TREND(%)02-06	PERUB (%) 06/05	PERAN (%) 2006	Jan-Des 2006
1	REP.RAKYAT CINA	2.098,6	2.337,3	3.358,3	4.551,3	5.502,0	29,62	20,89	13,07	5.502,0
2	JEPANG	4.388,4	4.208,9	6.053,5	6.892,4	5.488,0	9,86	-20,38	13,03	5.488,0
3	AMERIKA SERIKAT	2.627,5	2.681,9	3.148,3	3.810,6	3.968,2	12,48	4,14	9,43	3.968,2
4	SINGAPURA	2.052,6	1.842,2	2.527,4	2.936,9	3.733,4	18,09	27,12	8,87	3.733,4
5	THAILAND	1.071,5	1.543,7	2.363,9	3.082,0	2.962,3	31,33	-3,88	7,04	2.962,3

Dari tabel diatas,¹⁸ dapat dilihat bahwa walaupun investasi Jepang cenderung tidak stabil dan tidak mengalami peningkatan berarti, namun nilai ekspor ke Jepang justru terus merangkak naik. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan Jepang yang terus membutuhkan bahan ekspor dari Indonesia khususnya bahan gas. Sejak lama Jepang merupakan salah satu pasar potensial bagi ekspor Indonesia. Seiring dengan kenaikan pada *volume* ekspor, maka nilai ekspor ke negara Jepang sebagai negara ekspor utama mengalami peningkatan. Pada tahun

¹⁸ <<http://www.depdag.go.id/index.php?option=statistik&task=detil&itemid=06010210>>, (diakses pada tanggal 12 Juni 2008).

2006 terjadi peningkatan nilai ekspor sebesar 20,41% ke negara Jepang, demikian juga ekspor ke Singapura dan Amerika Serikat meningkat masing-masing sebesar 13,95% dan 13,82% menjadi 8.929,8 juta US dollar dan 11.232,1 juta US dollar.¹⁹ Sementara pada hal impor Jepang ke Indonesia, memiliki jumlah yang tinggi pula. Melalui tabel-tabel ini, dapat terlihat bahwa hubungan kedua negara yaitu Jepang dan Indonesia adalah saling membutuhkan satu sama lain.

Pada kenyataannya, Indonesia belum menjadi aktor utama dalam kancah *Foreign Trade Agreement* (FTA). Sejauh ini Indonesia belum pernah merumuskan suatu diplomasi ekonomi internasional dan memberikan arti penting dalam kancah FTA. Sampai saat ini, Indonesia belum pernah menyetujui FTA dengan negara manapun kecuali dalam regional ASEAN yang mulai bernegosiasi FTA dengan mitra dialog dengan beberapa negara seperti Jepang, AS, Cina, Korea Selatan, Australia, India dan beberapa negara Timur Tengah.

Salah-satu FTA yang paling penting bagi peningkatan ketahanan ekonomi Indonesia adalah FTA ASEAN-Jepang yang diberi nama kerjasama *Comprehensive Economic Partnership* (CEP) atau disebut juga *Economic Partnership Arrangement* (EPA). Pada tahap awal EPA telah dibentuk ASEAN-Japan *Closer Economic Cooperation* (CEP) *Expert Group* yang antara lain menyusun studi tentang kemungkinan pembentukan *Closer Economic Partnership* (CEP) yang mengarah pada FTA. AJCEP dengan proyeksi guna meningkatkan ekspor ke Jepang 44,2%, sebaliknya ekspor Jepang ke ASEAN akan diproyeksikan peningkatannya mencapai 27,5%. Selain itu Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN juga akan dapat meningkat dengan 1,99 persen, sedangkan PDB Jepang akan meningkat dengan 0,07%.²⁰

Negosiasi AJCEP ditindaklanjuti dengan kesepakatan FTA antara negara anggota ASEAN secara sendiri-sendiri dengan Jepang. Berangkat dari kesepakatan tersebut, Indonesia telah menindaklanjuti FTA bilateral yaitu Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement (IJ-EPA). Kemajuan yang dicapai EPA tidak terlepas dari kesepakatan antara mantan Presiden Megawati

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Keterlibatan Indonesia Dalam Forum Free Trade Area (FTA)*. (2006). <http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_list&news_category_title=Bulletin>, (diakses tanggal 3 September 2008).

Soekarnoputri dengan mantan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi pada Juni 2003 di Tokyo. EPA mencakup tiga pilar, pertama liberalisasi perdagangan barang dan jasa, *government procurement* dan investasi; kedua fasilitasi; dan ketiga kerja sama. Perundingan dilakukan dengan pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi pada APEC Summit Meeting di Chili bulan November 2004. Kedua kepala pemerintahan yang menyatakan secara resmi mengenai pentingnya EPA bagi pengembangan ekonomi kedua negara. IJ-EPA diharapkan meningkatkan kerjasama kedua negara dan dapat menguntungkan kedua Negara. Kerjasama ini penting bagi kedua Negara sebagai mitra dalam perdagangan yang membutuhkan aturan-aturan agar dapat menciptakan perdagangan menjadi lebih mudah, adil dan saling menguntungkan. Dalam perkembangan lebih lanjut, Indonesia-Jepang telah menuntaskan *joint study* yang dilakukan sebanyak tiga kali. Pertemuan terakhir adalah yang ketiga di Tokyo yang berlangsung 11–12 April 2005 lalu.

Jepang merupakan negara pertama bagi Indonesia dalam rangka pembentukan EPA. Kerja sama antara Indonesia dan Jepang memang tidak hanya sekadar liberalisasi perdagangan barang melalui FTA, namun lebih luas menyangkut investasi, jasa, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), fasilitasi dan pendapatan pemerintah (*government procurement*). Itu sebabnya, FTA dengan Jepang disebut FTA plus.

Indonesia tidak termasuk negara yang gencar melakukan FTA. Sebelumnya, Indonesia pernah menjajaki kerja sama FTA dengan Amerika Serikat namun buntu padahal FTA direncanakan memasuki tahap *joint study*.

Penandatanganan kerja sama ini menjadi barometer hubungan ekonomi antara Indonesia dan Jepang selangkah lebih maju. Akan tetapi ini masih dirasa ketinggalan dari negara Asean yang lainnya. Misalnya, Singapura telah menandatangani EPA dengan Jepang sejak tahun 2002, Malaysia, Philipina dan Thailand hampir bersamaan sejak tahun 2005. EPA Jepang dengan Amerika latin seperti Meksiko juga telah selesai tahun 2005, dan berikutnya menyusul Chili. Sementara ini Jepang masih menggesa EPA dengan negara ASEAN yang lainnya, termasuk juga dengan Australia, India dan Swiss.

Beragam penandatanganan EPA ini merupakan tonggak penting upaya

pemerintah untuk terus meningkatkan investasi Jepang ke Indonesia. Hampir tidak terhitung jumlah kunjungan dan promosi guna mengundang investasi Jepang, dari presiden, wapres, menteri, birokrat, sampai organisasi bisnis. Juga telah dibentuk *Joint Forum on Investment* untuk kepentingan serupa. Tampaknya pemerintah ingin "mengembalikan" kedudukan istimewa Jepang sebagai investor terbesar di Indonesia sepanjang masa Orde Baru.

Disamping hal kerjasama yang telah disampaikan, sebagai negara donor utama pada negara-negara Asia Timur, Jepang juga memfokus bantuannya pada Indonesia dan Cina. Bantuan pada Cina sejak awal 1990 sampai akhir 1994 berjumlah US\$9,28 milyar sedangkan pada Indonesia US\$11,6 milyar, meskipun kemudian Cina memperoleh bantuan yang lebih besar dibandingkan Indonesia.²¹

Dalam hubungan antara Jepang dan Indonesia yang menonjol adalah hubungan ekonomi, terutama penanaman modal, bantuan ekonomi dan perdagangan luar negeri antara kedua negara. Jika ditelaah, posisi Jepang yang dominan yaitu sebagai : 1). Kreditor, 2). mitra dagang, dan 3). investor terbesar di Indonesia. Melihat pada posisinya ini, Jepang adalah mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Dalam tahun 1995, Indonesia mengimpor sebesar US\$ 9,98 milyar, dengan mengekspor sebesar US\$14,2 milyar.²² Indonesia selama ini mengalami surplus dalam perdagangan dengan Jepang, lebih dari separonya impor Indonesia dari Jepang terdiri dari mesin (*machinery*), sedangkan sekitar 50 persen impor Jepang terdiri dari minyak dan gas (*migas*).

Sampai sekarang ini Jepang tetap merupakan investor terbesar di Indonesia dan pemberi bantuan terbesar (*largest donor*). Kosuke Mizuno dalam Perkembangan Penanaman Modal Jepang di Indonesia pada Masa Orde Baru dan Peralihan Sumber Daya Manusia (Oktober 1995),²³ menyatakan bahwa penanaman modal Jepang di Indonesia tetap berperan besar dalam perekonomian Indonesia, namun sejak beberapa tahun ini keberadaan penanaman modal Jepang lebih proporsional dimana perusahaan swasta nasional Indonesia meningkat

²¹ Widyahartono, Bob. Refleksi Hubungan Jepang-Indonesia, Dari Pampasan Perang Sampai Mobnas. <<http://www.jawapos.co.id/indones/jawapos/news/today/analysis/a1101096.htm>>, (diakses tgl 2 Oktober 2008)

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

peranannya.²⁴ Selain itu makin disadari meningkatnya penanaman modal dari Negara Industri Baru Asia yaitu Korea Selatan, Hongkong, Taiwan dan Singapura.

Dari 1967 (awal Orde Baru) sampai 1994, Jepang tetap merupakan investor terbesar dengan nilai investasi sebesar US\$15,66 milyar sekalipun terdapat penurunan dalam tahun 1993. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan investasi dari Korea Selatan untuk periode sama yaitu US\$5,44 milyar, dari Hongkong sebesar US\$ 12,0 milyar, dari Singapura US\$5,56 milyar dari Taiwan sebesar US\$ 6,57 miliar.²⁵ Tidak hanya sampai tahun 1994 saja, bahkan sampai tahun 2007, Jepang masih menjadi negara investor urutan pertama ke Indonesia. Urutan masuknya investasi asing ke Indonesia dapat dilihat dari tabel berikut²⁶:

Tabel II.7

Lima Besar FDI Di Indonesia Periode 1 Januari 1967-31 Maret 2006
(Berdasarkan Persetujuan)

No	Negara	Proyek	Nilai (US\$,000)
1.	Jepang	1.500	39.056.000
2.	Inggris	1.000	35.420.000
3.	Singapura	2.100	29.257.125
4.	Hongkong	550	21.001.034
5.	Amerika Serikat	645	20.54.000

Pada tabel terakhir, menunjukkan bahwa Jepang menjadi negara investor yang penting atas posisinya dalam urutan teratas lewat daftar lima besar FDI di Indonesia. Tabel tersebut memuat periode dari tahun 1967 hingga 2006, ini berarti Indonesia masih menjadi tujuan penting bagi Jepang untuk berinvestasi. Bagaimanapun juga akumulasi penanaman modal Jepang yang tetap paling besar

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Hasan., Nyimas Halimah, *op.cit.* hal. 13.

di Indonesia, sangat mendorong perkembangan industrinya, seperti permobilan, aluminium, peralatan elektronik, *Liquefied Natural Gas* (LNG) dan sebagainya. Peranan yang sangat besar dalam industri permintalan benang sintetik, industri tekstil untuk pertununan dan garmen. Mesin-mesin untuk pertununan dan *apparel* ini disediakan perusahaan Jepang dari Jepang. Dalam hal ini sering terdengar banyaknya staf Jepang yang menduduki posisi penting dalam perusahaan patungan di Indonesia. Kadang-kadang perusahaan yang bahkan sudah cukup lama beroperasi di Indonesia masih saja mengirim tenaga Jepang dalam jumlah besar ke perusahaan patungannya. Mizuno menyampaikan adanya penurunan pekerja Jepang dalam perusahaan yang sudah beroperasi lebih dari 15 tahun, meskipun dalam persentasi adalah sekitar 1,6-3,7%. Contohnya, perusahaan dengan sekitar 500 karyawan masih memakai karyawan Jepang sekitar 8 sampai 15 orang.²⁷

Obsesi "mengembalikan" posisi Jepang sebagai investor terbesar di Tanah Air tampaknya tidak mudah dicapai. Di tengah gencarnya kunjungan dan promosi bisnis ke Jepang, nilai investasi Jepang pada Januari-November 2006 mengalami penurunan 61,3 persen dibandingkan dengan nilai investasi Jepang pada periode sama tahun 2005.²⁸ Hal ini telah disinggung pula pada bab sebelumnya.

Gencarnya upaya Indonesia "merayu" Jepang agar berinvestasi di Indonesia di satu sisi justru memperlemah *bargaining position* Indonesia. Ketika Presiden Yudhoyono menyatakan pentingnya mempercepat penyelesaian perundingan EPA Indonesia-Jepang November 2006, mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe seakan membalas presiden dengan pernyataan bahwa untuk terciptanya investasi yang diharapkan tersebut, Indonesia harus menjamin pasokan gas alam untuk Jepang, selain segera menyelesaikan Undang-Undang Penanaman Modal.²⁹ Ketergantungan Jepang atas kebutuhan gas alam dari Indonesia dibuktikan pada tabel berikut:³⁰

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Yashuo, Hayashi. *Kemitraan Strategis Jepang-Indonesia*. <http://www.nabble.com/>, (diakses tanggal 7 September 2008)

²⁹ Hadi, Syamsul. *Kerja Sama Indonesia-Jepang*. Jakarta: Kompas. 20 Agustus 2007. Retrieved dari <<http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/Kerjasama%20Ind-Kps.pdf>>, (diakses tanggal 17 April 2008)

³⁰ Deplu RI, *op.cit.* hal. 32.

Tabel II.8

Ekspor Indonesia ke Jepang (Juta Dolar)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Minyak Bumi Mentah	2136,7	1857,5	1572,0	1877,6	1986,1	2253,8	264,7
Hasil-hasil Minyak	419,1	284,9	290,1	487,8	692,7	1074,8	1289,1
Gas	4460,5	4162,3	3753,5	4407,7	4899,8	5158,8	5597,5

Sumber: BPS

Dalam upaya untuk melihat apakah sumber daya alam Indonesia memiliki aspek penting bagi Jepang, maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan melihat perkembangan persetujuan investasi Jepang di Indonesia dalam tabel berikut ini:³¹

Tabel II.9

Ekspor Utama Produk Indonesia Ke Jepang Di Tahun 2006

Agrikultur, perikanan, perkebunan	US\$ 919 million
Sepatu	US\$ 118 million
Kayu dan sejenisnya	US\$ 1.17 billion
Karet	US\$ 971 million
Plastik	US\$ 380 million
Nikel dan sejenisnya	US\$ 1,3 billion
Alumunium dan sejenisnya	US\$ 449 million
Mebel	US\$ 204 million
TOTAL	US\$ 5.5 billion

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa ekspor Indonesia ke Jepang terbanyak adalah nikel dan sejenisnya. Sementara yang terendah adalah ekspor mebel. Selanjutnya dapat kita lihat bahan atau barang apa saja yang menjadi investasi Jepang di Indonesia.³²

³¹ Ibid.

³² Ibid.

Tabel II.10

Investasi Utama Jepang Ke Indonesia Tahun 1998-2006

Peralatan elektronik	US\$2.83 billion
Automotif dan peralatan transportasi	US\$1.64 billion
Mineral dan industri logam	US\$862 million
Bahan kimia dan obat-obatan	US\$780 million
Perdagangan	US\$661 million
TOTAL	US\$6.77 billion

Source: Kementerian Perdagangan Indonesia

Ada beberapa hal yang dapat dilihat dari tabel di atas, pertama adalah bahwa di tahun 2006, nikel dan sejenisnya menjadi bahan ekspor terbesar ke Jepang. Selanjutnya pada tabel berikut tergambar bahwa masih berlangsungnya ketertarikan Jepang untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Penanaman investasi di Indonesia cenderung terkonsentrasi pada sektor industri, dimana sektor ini memiliki keterkaitan erat dengan sumber daya alam dan manusia sebagai faktor produksi. Melalui data di atas, sekilas nampak bahwa tujuan MNC Jepang mengadakan investasi masih berkisar pada motivasi mencari sumber daya produksi, yang dalam hal ini adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam. Ketertarikan MNC Jepang terhadap Indonesia masih terletak pada sektor-sektor yang memerlukan sumber daya alam.

II.3 Fluktuasi Investasi Jepang Ke Indonesia

Sejak berakhirnya krisis 1997, banyak negara Asia seperti Thailand dan Korea Selatan telah bangkit dari keterpurukannya. Hal ini ditandai dari Bergeraknya sektor-sektor industri dan investasi di negara-negara tersebut. Sebagai contoh, investasi di Korea Selatan pasca krisis telah meningkat sebesar 39%. Dengan peningkatan angka pertumbuhan investasi ini, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut cepat merangkak yang pada akhirnya mereka segera bisa keluar dari krisis. Namun apa yang terjadi di Indonesia? Sampai sekarang ini, Indonesia masih belum keluar dari krisis, di mana sektor-sektor penentu pergerakan perekonomian masih dalam masa yang cukup krisis, seperti sektor

keuangan dan perbankan, begitu pula pada sektor industri dan investasi. Selain itu, Djafar (2006) juga menjelaskan.³³

The Indonesia crisis was different, bigger, and more problematic, and it concerned not just financial, banking, and economic matters, but also disorder, social crises and political crises. Thus, the important domestic causal factors that were defined as the relevant non-economic actors to the Indonesia crisis, were determinant, particular, and concrete aspects of this work (p.344).

Bank Dunia juga menyebutkan Indonesia merupakan negara yang mengalami penurunan investasi asing yang paling tajam dibanding negara-negara berkembang lainnya. *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) dalam laporannya mengenai investasi dunia pada tahun 2002 menempatkan Indonesia pada urutan ke-138 dari 146 negara.

Jepang selama ini menjadi partner dagang utama bagi Indonesia. Dari segi neraca perdagangan, Indonesia *surplus* dari Jepang US\$ 1,57 miliar. Ekspor Indonesia ke Jepang mencapai US\$ 7,57 miliar, sedangkan impor US\$ 6,0 miliar.³⁴ Namun, laporan angka perdagangan ini tidak sebaik investasi Jepang ke Indonesia. Investasi Jepang ke Indonesia menurun dalam beberapa tahun terakhir belum pulih seperti tahun 1997. Sebagai gambaran, berdasarkan data BKPM selama sembilan tahun terakhir, nilai persetujuan investasi Jepang pada 1997 merupakan rekor tertinggi senilai US\$ 5,3 miliar sementara anjlok tajam tahun 2002 hanya sebesar US\$ 518 juta. Dalam dua tahun terakhir berturut-turut persetujuan investasi Jepang naik dari menjadi US\$ 1,2 miliar (2003) dan US\$ 1,6 miliar (2004).³⁵

Tren penurunan investasi ini memang tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara ASEAN secara keseluruhan Jepang mengurangi investasinya. Investasi Jepang banyak yang keluar dari ASEAN apakah kembali ke negaranya atau merelokasi ke Cina.

Data ASEAN-Japan Center menunjukkan investasi Jepang di ASEAN anjlok tajam sejak 1997 yang mencapai 961,3 juta yen yang merupakan puncak

³³ Djafar, Zainuddin. *Rethinking Indonesian Crisis*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2006.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

investasi Jepang di ASEAN. Nilai ini langsung melorot pada 1998 menjadi 521,4 juta yen Jepang, tahun 1999 turun lagi menjadi 445,0 juta yen dan mencapai titik terendah pada 2000 sebesar 280,4 juta yen. Tahun 2001 naik sedikit menjadi 452,8 juta yen namun turun lagi menjadi 270,9 juta yen.³⁶

Menurut laporan UNCTAD yang tertuang dalam publikasinya pada *World Investment Report 2006*,³⁷ Indonesia tergolong sebagai negara penerima investasi yang potensi maupun kinerjanya rendah (*under-performers*). Negara-negara lain yang termasuk dalam kategori ini antara lain Bangladesh, India, Pakistan, dan Sri Lanka. Sebaliknya, negara yang memiliki potensi dan kinerja tinggi (*front-runners*), antara lain Cina, Hongkong, Malaysia, dan Singapura.

Walaupun laporan diatas menunjukkan kabar yang tidak baik, namun ada satu kabar gembira, posisi Indonesia yang buruk soal peringkat pada tahun 2006 itu merupakan perbaikan dari peringkat dari dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2004, indeks penampilan Indonesia soal kedatangan investasi ada di urutan ke-136 pada 2004 dan di urutan ke-106 pada tahun 2005. Namun, para negara tetangga RI di ASEAN juga mengalami perbaikan peringkat pada periode yang sama dalam konteks indeks kedatangan investasi.³⁸

Bisa dikatakan, andaikan tidak memiliki sumber daya alam, Indonesia mungkin sudah tak akan dilirik investor asing. Dalam laporan UNCTAD itu, investasi masih berdatangan ke Indonesia. Namun, jenis investasi yang masuk itu adalah investasi di sektor pertambangan, terutama yang beraasal AS. Namun, investasi untuk sektor pertambangan juga memperlihatkan potensi buruk. UNCTAD melaporkan bahwa hubungan rakyat sekitar dengan perusahaan pertambangan juga sarat dengan konflik sosial. Ini pulalah yang turut membuat investasi untuk sektor pertambangan juga surut ke Indonesia pada tahun 2006. Penurunan investasi yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:³⁹

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *World Investment Report 2006*. < www.unctad.org/en/docs/wir2006_en.pdf>, (diakses tanggal 2 November 2008).

³⁸ *Laporan Investasi Dunia: Posisi Indonesia Meredup*. <<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0801/12/ln/4160977.htm>> (diakses tanggal 18 November 2008).

³⁹ Tambunan, Tulus. *Pengkajian Kebijakan Investasi Riil di Indonesia*. <<http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2929-16062008.pdf>>, (diakses tanggal 1 Oktober 2008).

Tabel II.11

Perkembangan Realisasi PMA di Indonesia 2001 – 2006

Tahun	Jumlah Proyek	Nilai (Juta Dollar AS)
2000	638	9.877,4
2001	454	3.509,4
2002	444	3.091,2
2003	571	5.450,6
2004	546	4.602,3
2005	909	8.914,6
2006	867	5.977,0

Sumber: BKPM

Kecenderungan penurunan nilai investasi ini tentunya terjadi pada PMA. Angka persetujuan PMA mencapai nilai tertinggi pada tahun 1997 dimana persetujuan PMA mencapai angka US dolar 33.665,5 juta, dengan jumlah proyek 783. Kemudian, pada tahun 1998, nilai investasi asing di Indonesia menurun tajam dan hanya mencapai angka US dolar 13.635,1 juta, kemudian menurun lagi di tahun 1999 menjadi hanya US dolar 10.894 juta.⁴⁰ Pada tahun 2000 nilai persetujuan PMA naik sekitar 50 persen menjadi US dolar 15.413 juta. Namun kemudian, di tahun 2001 nilai investasi kembali menurun tipis menjadi US dolar 16.371,3 juta. Nilai investasi asing di Indonesia kembali menghadapi ancaman dengan anjloknya nilai investasi sebesar 35% dan menjadi US dolar 10.019,1 juta di tahun 2002.⁴¹ Di tahun-tahun selanjutnya investasi terus mengalami pasang surut, dimana masih belum kembali ke seperti tahun 1997.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENGARUH FLUKTUASI INVESTASI JEPANG DI INDONESIA

Posisi Indonesia sebagai negara tujuan investasi oleh investor Jepang dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Data BKPM menunjukkan, terdapat dua negara yang mengalami penurunan investasi ke Indonesia secara signifikan, yakni Cina yang turun 43,22 persen dan Jepang 61,13 persen.¹ Dengan demikian, investasi dari Jepang merupakan yang paling mengkhawatirkan. Pada 2005, Indonesia berada di urutan ke-8 sebagai negara tujuan investasi Jepang. Sedangkan di tahun 2006, posisi Indonesia merosot, berada di urutan ke-9. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:²

Tabel III.1

Peringkat Negara Tujuan Investasi Jepang berdasarkan hasil studi yang dilakukan JICA		
Peringkat	2005	2006
1	China	China
2	India	India
3	Thailand	Vietnam
4	Vietnam	Thailand
5	Amerika Serikat	Amerika Serikat
6	Rusia	Rusia
7	Korea Selatan	Brazil
8	Indonesia	Korea Selatan
9	Brazil	Indonesia
10	Taiwan	Taiwan

Sumber: BKPM

KARTIKA

Masalah merosotnya investasi Jepang di Indonesia itu diungkapkan oleh Kepala BKPM, Muhammad Lutfi di Komisi VI DPR. Lutfi mengutip hasil survei

¹ Nilai Investasi Jepang Anjlok 61,13 Persen. Retrieved dari: <<http://els.bappenas.go.id/upload/other/Nilai%20Investasi%20Jepang%20Anjlok%2061.htm>>, (diakses tanggal 25 April 2008).

² Suara Pembaruan Daily. *Minat Jepang Berinvestasi di Indonesia Merosot*. 6 Desember 2006. <<http://groups.yahoo.com/group/ambon/message/44218>>, (diakses tanggal 8 Juni 2008).

yang dilakukan oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA) terhadap pengusaha terkemuka Jepang. Dari data-data tersebut, yang paling mengkhawatirkan adalah Jepang. Survei JICA terhadap pengusaha terkemuka Jepang, menggambarkan dari tahun ke tahun posisi Indonesia sebagai tujuan investasi mereka terus menurun. Kalau posisi Indonesia terus merosot, sebaliknya Thailand dan Vietnam melejit ke posisi atas.³ Posisi kedua negara tersebut jauh di atas Indonesia sebagai negara yang berhasil menarik perhatian investor Jepang. Vietnam bahkan menggeser posisi Thailand. Pada 2005, Vietnam berada di urutan ke IV sedangkan Thailand di urutan ke III. Namun, tahun 2006 posisi Vietnam di urutan ke III sedangkan Thailand di urutan ke IV sebagai negara tujuan investasi Jepang. Posisi Indonesia tepat di bawah Korea Selatan baik tahun 2005 maupun di 2006. Menurut Lutfi, ada lima masalah yang menjadikan pengusaha Jepang urung menanamkan modalnya di Indonesia. Pertama, masalah perizinan di bidang bea dan cukai. Kedua, masalah pajak. Ketiga, realisasi pembangunan infrastruktur yang lambat. Keempat, kepastian aturan ketenagakerjaan yang tidak kunjung tuntas. Kelima, masalah tata kelola yudisial yang meragukan.

Sementara itu saat ini sudah terdapat banyak studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung. Namun demikian metodologi yang digunakan dan hasil studi masih sangat bervariasi. Meskipun faktor-faktor yang dianggap tetap (*ceteris paribus*) pengaruhnya sangat kuat, seperti variabel makro ekonomi yaitu pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tetapi masih juga terdapat kesimpulan yang berbeda dan menimbulkan berbagai perdebatan. Investasi menjadi salah satu sumber pembiayaan (modal) yang penting bagi negara berkembang, dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan melalui transfer asset dan manajemen, serta transfer teknologi guna mendorong perekonomian negara.

Hal lain mengenai investasi adalah, motivasi bisnis dapat bersifat aktif atau reaktif. Meskipun banyak perusahaan dari negara-negara maju didorong untuk melakukan relokasi karena meningkatnya biaya produksi, namun banyak investasi merupakan bagian dari strategi pro-aktif untuk memanfaatkan kesempatan pasar. Pada saat yang bersamaan, keputusan investasi seringkali

³ *Ibid.*

dibuat untuk menanggapi perubahan internal atau eksternal seperti apresiasi mata uang untuk industri berorientasi ekspor, meningkatnya upah, dan lain-lain. Suatu perusahaan dapat juga membuat keputusan untuk melakukan investasi di luar negeri dalam kaitannya dengan penurunan pangsa pasar produk yang diproduksinya.

Keputusan lokasi investasi juga berkaitan erat dengan kekuatan persaingan yang menjadi ciri industri tertentu. Termasuk di dalamnya perubahan dalam teknologi produksi, jaringan distribusi dan pemasaran, sifat pesaing, jaringan pemasok, aliansi strategis, dan hubungan bisnis, aspek kultural, dan lain sebagainya, yang semuanya mencirikan lingkungan suatu perusahaan.

Motivasi investasi dapat lebih baik dipahami melalui analisis lingkungan kompetitif suatu sub-sektor industri, atau lebih baik lagi melalui analisis tingkat segmentasi produk. Secara umum analisis mengenai pola FDI secara global dijelaskan dalam sekumpulan faktor ekonomi makro dan spesifik industri/perusahaan yang mempengaruhi keputusan awal untuk melakukan investasi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menjamin akses pasar

Perusahaan melakukan investasi untuk menjamin akses ke pasar konsumen. Perusahaan ekspor pakaian misalnya, melakukan investasi di negara-negara yang memiliki kuota *Multi-Fiber Arrangements* (MFA). Perusahaan barang konsumen menentukan lokasi investasi untuk menjamin akses yang mudah ke pasar domestik atau regional yang berskala besar.

2. Mengikuti strategi penawaran dan produksi global atau regional

Meningkatnya globalisasi produksi mempunyai pengaruh pada keputusan lokasi investasi. Perusahaan seringkali memutuskan untuk melakukan investasi sebagai bagian dari strategi global dalam *sourcing*. Dalam banyak kasus, motivasi investasi adalah untuk menjamin pangsa pasar global.

3. Berada di depan dalam persaingan

Keputusan investasi dibuat untuk menahan pesaing agar mereka tetap berada di luar negara atau pasar tertentu.

4. Menurunkan biaya produksi per-unitnya

Untuk industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki, berlokasi di negara-negara dengan upah tenaga kerja yang rendah merupakan cara untuk mempertahankan daya saing. Meningkatnya upah tenaga kerja memaksa perusahaan ini berpindah lagi ke negara lain dengan upah lebih rendah.

5. Menjamin akses ke bahan mentah

Bagi perusahaan pertambangan dan perminyakan akses pada sumber bahan mentah merupakan persyaratan utama.

6. Akses ke teknologi dan ketrampilan

Perusahaan dengan kegiatan *research and development* yang besar menentukan untuk berlokasi dengan akses ke teknologi dan tenaga kerja terampil.

Faktor-faktor tersebut mendorong atau menarik perusahaan multinasional untuk mencari kawasan potensial bagi lokasi produksi di luar negeri. Pada saat keputusan untuk investasi atau perkembangan perusahaan telah ditetapkan dan kesempatan pasar telah diidentifikasi maka pencarian lokasi tertentu untuk investasi mulai dilakukan. Hanya pada tahapan inilah variabel negara tuan rumah mulai memainkan peranannya.

Faktor yang sangat penting atas manfaat dan biaya investasi asing terhadap negara penerima adalah suasana kebijakan di negara penerima itu. MNC menawarkan suatu paket produksi, manajemen, dan teknologi pemasaran. Hal utama bagi negara penerima adalah memaksimalkan pangsa pinjaman atas faktor-faktor tersebut sehingga konsisten dengan tujuan pembangunan dalam arti luas.

Namun, sumber investasi asing tersebut bukannya tidak penting, sedikitnya untuk dua alasan. Pertama, dalam hal investasi asing, banyak negara berupaya menghindarkan ketergantungan terhadap satu, atau beberapa negara. Hal ini bukanlah sekedar menyadari kepekaan politik, sentimen nasional, atau bahkan kekhawatiran terhadap manipulasi asing. Melainkan ada alasan-alasan penting secara ekonomis. Keragaman sumber investasi asing menambah arus informasi tentang teknologi dan pasar luar negeri, dan dengan demikian mendapatkan kekuatan tawar-menawar bagi pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara penerima. Alasan kedua, saat ini, menurut pengamatan kalangan, ada kecenderungan perbedaan perilaku para penanam modal asing dari berbagai

negara. Hal tersebut termasuk faktor-faktor seperti kecenderungan perusahaan untuk mengekspor, memasuki usaha-usaha patungan, dan mengalihkan serta menyesuaikan teknologi. Hal ini merupakan suatu pengamatan yang relatif baru, terutama karena modal para eksportir yang cukup besar di antara ekonomi pasar yang sebelum tahun 1970 hampir seluruhnya dari Amerika Serikat dan sebagian kecil dari negara-negara Eropa.

Meskipun investasi asing di Indonesia mendapat perhatian, sangat sedikit yang secara serius mengemukakan komposisi seluruh investasi asing berdasarkan negara asal. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat kesimpulan bahwa Jepang merupakan penanam modal yang dominan di Indonesia sejak tahun 1966. Meskipun kesimpulan tersebut benar untuk industri manufaktur, yang merupakan mayoritas dari persetujuan-persetujuan BKPM, tetapi kesimpulan tersebut tidak berlaku bagi seluruh sektor. Hal ini disebabkan investor terbesar sektor minyak dalam periode Orde Baru adalah Amerika Serikat.

Comparative advantage mempunyai potensi yang penting dalam menjalankan perekonomian suatu negara. Seperti yang telah dijelaskan pada bab I bahwa *comparative advantage* mempunyai kontribusi dalam menentukan tingkat aliran investasi asing ke sebuah negara. Dalam penelitian ini, *comparative advantage* pada Indonesia akan dilihat lewat beberapa hal, antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, *opportunity cost* dan juga *country risk*.

Melihat kepada apa yang dimaksud dengan *comparative advantage*, faktor ini merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan bagi para pihak investor untuk pengadaan investasi ke sebuah negara. Hal ini dikarenakan bahwa *comparative advantage* yang dimiliki suatu negara dipertimbangkan sebagai input produksi dari investasi yang akan ditanam oleh para investor. Karena alasan inilah, *comparative advantage* mempunyai keterkaitan yang penting dalam melihat pola dan juga pergerakan aktifitas investasi asing yang terjadi di sebuah negara.

III.1 Faktor-Faktor Pembentuk Comparative Advantage Indonesia

Comparative advantage pertama kali dinyatakan oleh David Ricardo di tahun 1817. Selain dipergunakan untuk menjelaskan fenomena perdagangan,

dipergunakan juga untuk menjelaskan terjadi investasi antar negara. *Comparative advantage* pada dasarnya dipergunakan untuk memperlihatkan alternatif bagi sebuah negara dalam berproduksi berdasarkan kondisi-kondisi keuntungan yang dimilikinya. Berikut akan dijabarkan faktor-faktor dalam *comparative advantage* untuk mencari sebab dari fluktuasi aliran investasi Jepang di Indonesia.

III.1.1. Sumber Daya Alam

Kekayaan alam merupakan salah satu faktor yang penentu kedudukan dan citra suatu negara dalam kancah percaturan ekonomi dan politik global. Pada awal dekade tujuh puluhan negara-negara pemilik sumber daya alam yang tak terbatas jumlahnya sangat menikmati hasil penjualan ekspor ke negara-negara konsumen. Sumber daya alam yang menentukan arah perekonomian suatu negara, bahkan dunia adalah minyak bumi (*crude oil*) atau minyak mentah. Sebagian besar energi, baik energi panas, gerak ataupun listrik adalah hasil konversi pembakaran minyak bumi. Selain minyak bumi, tingkat konsumsi batu bara (*coal*), dan gas alam (*natural gas*) sebagai sumber energi juga cukup tinggi, walaupun masih di bawah minyak bumi.

Indonesia merupakan salah satu negara *megabiodiversity*. Meskipun luas arealnya hanya mencakup 1,3% dari seluruh luas permukaan bumi, namun kekayaan jenis makhluk hidupnya mencapai 17% dari seluruh total jenis yang ada didunia.⁴ Dari sekian besar kekayaan jenis di Indonesia, baru sebagian kecil yang telah benar-benar dipelajari dan dipahami oleh manusia. Di mata dunia, Indonesia dianggap mempunyai daya tarik yang besar bagi para investor karena adanya ketersediaan sumber daya alam yang berlimpah. Hal ini dapat terlihat dari segi kualitas lahan, pertanian, pertambangan, perikanan, dan juga kehutanan.

Indonesia memiliki jumlah lahan yang luas, yaitu 1.919.443 km².⁵ Lahan yang luas ini berpotensi sebagai lahan tujuan investasi terutama di wilayah bagian Timur Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan infrastruktur sehingga hal ini

⁴ *Indonesia: Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati Dan Konservasinya*. <<http://addiehf.wordpress.com/2007/06/14/keanekaragaman-sumber-daya-alam-hayati-dan-konservasinya/>>, (diakses tgl 2 Mei 2008).

⁵ *The World Book Encyclopedia*, Vol. 10, Chicago: World Book Inc, 1995, hlm. 192.

menyebabkan beberapa wilayah ataupun kawasan tertentu sulit berkembang. Tetapi diluar hal itu, Indonesia masih memiliki banyak kawasan nusantara yang berpotensi untuk dapat dikembangkan oleh investor melihat dari luas lahan dan kontur geografis yang ada.

Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menghasilkan beragam komoditas yang bermanfaat mulai dari bidang pertanian, perikanan, kehutanan dan pertambangan. Dari bidang pertanian antara lain: kopi, teh, karet, kelapa, tebu, tembakau, kacang-kacangan, rempah, umbi-umbian. Dari bidang perikanan, dimana Indonesia menjadi salah satu penghasil produk terbesar di dunia, contohnya yaitu produk ikan berupa sarden, makarel, tuna, dan juga udang. Pada bidang kehutanan, Indonesia merupakan salah satu penghasil terbesar komoditi kayu-kayuan seperti jati, eboni, bambu, dan rotan. Sementara dari pertambangan, terdapat produksi minyak mentah, gas alam, seng, batubara, tembaga, mangan, nikel, sulfur, emas juga perak. Ketersediaan komoditas pertambangan pada produksi gas alam dapat dilihat pada tabel berikut ini.⁶

Tabel III.2
Produksi Perminyakan dan Gas Alam Tahun 1996-2005

Tahun	Minyak Mentah (barrel)	Condensate (barrel)	Gas Alam (barrel)
1996	485,573.80	63,074.50	3,164,016.20
1997	484,340.60	59,412.00	3,166,034.90
1998	480,109.70	54,782.30	2,978,851.90
1999	440,461.60	54,181.40	3,068,349.10
2000	434,368.80	50,024.50	2,845,532.90
2001	432,588.00	47,528.10	3,762,828.50
2002	351,949.60	45,358.90	2,279,373.90
2003	339,100.00	44,600.00	2,142,605.00
2004	354,351.90	50,641.00	3,026,069.30
2005	341,824.20	41,995.60	2,892,908.10

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005

⁶ <<http://www.bps.go.id/sector/minning/table1.shtml>>, (diakses tanggal 25 April 2008).

Tabel diatas memperlihatkan beberapa komoditas pertambangan Indonesia beserta produksinya pada kurun waktu sebelum dan setelah terjadinya krisis ekonomi Asia 1997. Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa ketersediaan komoditas pertambangan yaitu minyak dan gas alam cenderung relatif stabil walaupun telah terjadi tingkat peningkatan dan penurunan. Terlepas dari terjadinya fluktuasi diatas, produksi komoditas-komoditas tersebut pada dasarnya tetap dapat dan mampu dilakukan peningkatan terutama setelah terjadinya krisis ekonomi Asia. Oleh karenanya, secara tidak langsung produksi komoditas tersebut relatif stabil.

Jika sebenarnya dilihat lagi dari segi sumber daya alam, bahwa *comparative advantage* Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti, peran sumber daya alam itu sendiri pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya permintaan. Oleh karenanya, pengaruh sumber daya terhadap investasi asing Indonesia didasari pada dimana investasi tersebut ditanamkan dan juga mungkinkah adanya cara atau alternatif lain dalam memperoleh sumber daya alam tersebut, baik dengan mencari bahan pengganti ataupun mencari sumber daya alam yang sama tetapi dari negara lain.

III.1. 2 Sumber Daya Manusia

Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia. Salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal. Untuk menciptakan SDM berkualitas dan handal yang diperlukan adalah pendidikan. Sebab dalam hal ini pendidikan dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan.

SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini bahkan kadangkala kita abaikan. Dalam kaitan tersebut setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM Indonesia, yaitu:

Pertama adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang

ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta.⁷ Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi. Hal ini ditambah lagi, lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat.

Sementara itu, Direktur Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi Bappenas, Bambang Widianto mengungkapkan, struktur angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SD dan di bawah SD mencapai 58,6 persen dari total angkatan kerja sebanyak 100,77 juta orang pada tahun 2002. Struktur pekerja dengan tingkat pendidikan SD dan di bawah SD mencapai 60,9 persen dari 91,65 juta orang pada tahun 2002. Untuk struktur angkatan kerja dengan tingkat pendidikan universitas baru mencapai 2,7 persen. Struktur pekerja dengan tingkat pendidikan universitas sebesar 2,6 persen.⁸

Indonesia selama tiga dekade terakhir mencatat berbagai kemajuan dalam pembangunan SDM dengan adanya indikasi membaiknya berbagai indikator SDM sejak 1960 hingga 1999. Namun, berbagai indikator SDM Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya. Tetapi sampai pada tahun 2007, sumber daya manusia Indonesia dalam segi kualitas masih terpuruk jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, bahkan di bawah Vietnam yang baru stabil kondisi politik dalam negerinya beberapa tahun terakhir ini setelah dilanda perang saudara.⁹

Mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

⁷ Damanhuri, Didin. S. *SDM Indonesia dalam Persaingan Global*. 13 Juni 2003. <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0306/13/opi01.html>>, (diakses tgl 20 Oktober 2008).

⁸ *Pengangguran Masih Suram hingga Tahun 2008*. <<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0309/10/utama/552704.htm>>, (diakses tgl 2 September 2008).

⁹ *Peningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Indonesia Agar Dapat Bersaing Di Luar Negeri*. Retrieved dari: <<http://fahrudin2008.files.wordpress.com/2008/06/>>, (diakses tanggal 5 November 2008).

Bappenas, Kwik Kian Gie, ketika membuka Tinjauan Paruh Waktu Program Kerja Sama Pemerintah RI dan The United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2001-2004 pada tanggal 22 Oktober 2003 di Jakarta mengungkapkan pernyataan-pernyataannya.¹⁰ Berbagai indikator SDM Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan prestasi negara ASEAN, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Hal ini terlihat antara lain dari rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi murid sekolah, dan pengeluaran per kapita. Sementara itu, berdasarkan *Human Development Report* 2003, peringkat *Human Development Index* (HDI) Indonesia menempati urutan 112 dari 175 negara. Kwik menambahkan, Indonesia saat ini dihadapkan pada kondisi melambatnya pencapaian indikator-indikator di bidang pembangunan SDM, antara lain disebabkan oleh kondisi ekonomi dan sosial politik serta ketahanan dan keamanan yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, salah satu tantangan besar bagi Indonesia adalah bagaimana untuk kembali mencapai kemajuan pesat yang pernah diraih sebelumnya.

Kondisi perekonomian Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi cukup pesat pada beberapa dekade sebelum krisis Asia 1997, mempunyai dampak signifikan terhadap pola sumber daya manusia. Sebagai contoh, sebanyak 60% tenaga kerja bekerja di sektor pertanian dan sisanya kurang dari 40% bekerja di sektor industri dan jasa. Namun kondisi ini berubah dengan bertambahnya waktu dimana pada tahun 1990 terdapat sekitar 54,8% pekerja di bidang pertanian, disusul sekitar 14,7% pekerja bidang perdagangan, 13,1% pada bidang jasa, 11,5% di bidang manufaktur, sementara sisanya telah terdistribusi ke bidang yang lainnya.

Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia. Salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal. Untuk menciptakan SDM berkualitas dan handal yang diperlukan adalah pendidikan. Sebab dalam hal ini pendidikan dianggap sebagai mekanisme

¹⁰ Siswono. Indikator SDM Indonesia masih Jauh Tertinggal. 23 Oktober 2003. <<http://www.gizi.net/cgi-bin/berita/fullnews.cgi?newsid1066879709,76863>>, (diakses tgl 12 Oktober 2008).

kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan. Pendidikan merupakan kegiatan investasi di mana pembangunan ekonomi sangat berkepentingan. Sebab bagaimanapun, pembangunan ekonomi membutuhkan kualitas SDM yang unggul baik dalam kapasitas penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) maupun sikap mental, sehingga dapat menjadi subyek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan.

III.1.3. Country Risk

Modal utama bagi masuknya investasi asing ke Indonesia adalah kondisi aman, nyaman, dan tenang serta pelayanan yang baik. Namun demikian citra Indonesia secara keseluruhan dan *country risk* Indonesia yang masih tinggi sedikit mempersulit upaya pemerintah mendorong investasi asing. *Country risk* merupakan tingkat risiko bagi investor asing untuk menanamkan modalnya ke suatu negara penerima. Faktor ketiga ini terdiri atas dua jenis, yaitu politik dan moneter. Pada segi politik, hal ini berkaitan dengan adanya kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pajak, kepemilikan dan jaminan terhadap kelangsungan aktivitas perusahaan asing di negara yang bersangkutan beserta kestabilan politiknya. Sementara pada segi moneter, hal ini berkaitan dengan tingkat inflasi maupun tingkat suku bunga. Kedua jenis dari *country risk* ini akan dijabarkan lebih lanjut berikut ini. Hubungan antara ketidakstabilan politik dan ketidakstabilan ekonomi tidak bersifat *mutually exclusive*, melainkan *causality interdependence*. Ini berimplikasi logis adanya kekhawatiran terhadap kinerja ekonomi yang akan tetap atau semakin memburuk jika stabilitas politik dalam menyebabkan lemahnya daya saing ekonomi Indonesia.

Mengapa risiko negara di Indonesia masih begitu tinggi? Dalam memperkirakan tingkat *country risk* tersebut biasanya dicakup tiga komponen yakni risiko politik, risiko finansial dan risiko ekonomi (*risk economy*). Komponen risiko politik biasanya menempati bobot yang paling besar dalam

membentuk *country risk* tersebut. Karena itu, apabila destabilitas politik meningkat, maka *country risk* pun akan meningkat secara signifikan.

III.1.3.A. Country Risk Politik

Faktor ini, jelas tidak bisa diabaikan. Studi yang penulis lakukan atas pengaruh risiko politik menunjukkan bahwa variabel politik merupakan variabel yang signifikan dalam perekonomian Indonesia, khususnya pengaruhnya terhadap investasi luar negeri dan kurs mata uang. Bahkan, risiko politik jauh lebih besar pengaruhnya dibanding risiko finansial maupun risiko ekonomi. Risiko politik ini telah menjadi variabel fundamental non-ekonomi yang berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia.¹¹ Berkenaan dengan masalah politik ini, Djafar (2006) menuliskan pada bukunya:¹²

Indonesia suffered an enormous economic setback during the Asian crisis. Indonesia was the country that suffered the most within region. In every phase of the crisis, Indonesians experienced radical problems in the form of disorder, demonstrations and riots (p.98).

Secara empiris banyak studi menunjukkan stabilitas politik merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh Alesina dan Peroti.¹³ Ketidakstabilan politik berkorelasi positif dengan tingkat inflasi dan berkorelasi negatif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Alesina dan Peroti menyontohkan Amerika Latin. Proses transisi demokrasi yang terjadi negara tersebut ternyata harus dibayar mahal; yakni berupa pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah selama proses transisi tersebut berlangsung. Sementara pada negara yang secara politis stabil pun ada karakteristik yang berbeda. Di negara-negara yang proses demokrasinya sudah mantap (salah satu indikator demokrasi yang digunakan adalah pemerintahan sipil), tingkat pertumbuhannya relatif stabil dan tinggi, sementara di negara yang secara politis stabil tetapi proses demokrasinya masih rendah (di negara

¹¹ Insukindro. *Asian Crisis: a Global Perspective*. 1998.

¹² Djafar, Zainuddin., *op.cit.* hal. 98.

¹³ Alesina & Peroti. *The Political Economy of Growth: A Critical Survey of Recent Literature*. The World Bank Economic Review 1994 No 3.

berkembang yang cenderung represif dan campurtangan militer masih kuat), tingkat pertumbuhannya cukup tinggi, tetapi cenderung tidak stabil .

Risiko negara (*country risk*) dapat diukur melalui indeks *country risk* yang telah dikembangkan oleh *International Country Risk Guide* (ICRG). Semakin besar angka indeks berarti menunjukkan bahwa semakin kecil risiko suatu negara. Hasil studi menunjukkan bahwa risiko politik mempunyai pengaruh negatif signifikan pada kurs rupiah terhadap dolar AS. Semakin tinggi risiko politik maka kurs rupiah terhadap dolar AS akan semakin melemah. Semakin rendah risiko politik maka kurs rupiah akan semakin menguat.

Mengikuti konsep penilaian yang digunakan oleh *International Country Risk Guide* (ICRG), dalam menelaah pengaruh risiko politik tersebut, ada indikator-indikator penting yang menjadi kunci tergoncangnya stabilitas politik. Beberapa indikator tersebut menjadi stabilitas pemerintahan, konflik internal, profil investasi termasuk pada kelompok indikator yang mempunyai bobot paling tinggi. Kemudian, korupsi, konflik agama, hukum dan peraturan, serta peran militer, termasuk pada kelompok kedua.

Letupan berupa *early warning* atas munculnya pemeringkatan *country risk* pada akhir Maret 1997, berlanjut kepada versi *Economist Intelligence Unit* (EIU), yang memberi predikat "D" kepada Indonesia (dari skala A sampai E).¹⁴ Peringkat Indonesia itu, jelas amat dipengaruhi oleh berbagai gejolak sosial-politik (sospol) yang terjadi secara beruntun di tanah air.

Kondisi yang ada membuat Indonesia dihadapkan pada kebutuhan sumber dana alternatif berupa pinjaman luar negeri dan PMA. Keterbatasan sumber dana dalam negeri memiliki dampak besar bagi pembangunan jangka panjang Indonesia, dimana tanpa bantuan itu, pembangunan setidaknya tidak akan dilaksanakan. Cara paling memungkinkan untuk menutupi sumber dana dalam negeri adalah dengan mengerahkan modal asing yang disediakan oleh masyarakat bisnis internasional.

Semenjak krisis ekonomi 1997 hingga tahun 2006, telah terjadi pergantian presiden sebanyak lima kali. Pergantian tersebut antara lain adalah: Soeharto [12](#)

¹⁴ <<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/04/09/0167.html>>, (diakses tanggal 25 April 2008)

[Maret 1967-21 Mei 1998](#); B.J Habibie [21 Mei 1998-20 Oktober 1999](#); Abdurrahman Wahid [20 Oktober 1999-23 Juli 2001](#); Megawati Soekarnoputri [23 Juli 2001-20 Oktober 2004](#); dan [Susilo Bambang Yudhoyono 20 Oktober 2004 20 Oktober 2004](#). Kondisi ini dirasa sanggup mempengaruhi citra Indonesia di mata Internasional. Pergantian ini memperlihatkan pergolakan politik yang terjadi, khususnya sebelum 2001 dan memungkinkan pula akan berlanjut lagi. Sehingga, hingga saat ini stabilitas politik Indonesia masih belum dapat dikatakan stabil atau pada tahap memuaskan.

III.1.3.B. Country Risk Moneter

Unsur kedua dalam perhitungan *country risk* adalah risiko finansial dan risiko ekonomi. Beberapa indikator yang tercakup di dalamnya adalah rasio transaksi berjalan terhadap *Gross Domestic Product* (GDP), stabilitas kurs, tingkat inflasi, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) akan menjadi pemicu meningkatnya risiko negara tersebut, karena kedua komoditas tersebut mempunyai pengaruh kuat yang mendorong terjadinya eskalasi harga. Meningkatnya risiko finansial dan ekonomi tampak pula dari anjloknya indeks harga saham. Namun ini lebih bersifat jangka pendek. Kurs Rupiah relatif juga tidak mengalami volatilitas yang berarti. Demikian pula, tingkat bunga tidak mengalami gejolak. Hanya tingkat inflasi yang tampaknya akan berpengaruh terhadap risiko finansial dan ekonomi ini. Dari gambaran ini, risiko finansial dan ekonomi yang paling rawan adalah unsur inflasi. Sayangnya, tingkat inflasi ini mempunyai korelasi yang kuat terhadap stabilitas politik dan ekonomi. Karena itu, walaupun "hanya" tingkat inflasi yang mengkhawatirkan terhadap meningkatnya *country risk*, tetapi ini merupakan unsur vital yang harus mendapat perhatian dalam pengendaliannya.

Hal lain yang menjadi perhatian pada *country risk* ini adalah masalah korupsi. Di tahun 2002, Indonesia kembali dinobatkan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), sebuah lembaga konsultasi politik dan ekonomi, yang berbasis di Hongkong sebagai "juara" korupsi di Asia. Penilaian tersebut didasarkan atas hasil survei pada 1.000 ekspatriat (pengusaha asing) periode 2002

pada 12 negara di Asia. Penilaian tersebut didasarkan atas hasil survei pada 1.000 ekspatriat (pengusaha asing) periode 2002 pada 12 negara di Asia.¹⁵ Indikator wawancara yang digunakan adalah soal penyuapan kepada birokrasi dalam rangka investasi seperti izin usaha, ekspor-impor dan penyuapan lainnya.

Dengan menggunakan skor 0-10 (0 = terbaik dan 10 = terburuk), Indonesia meraih nilai 9,92 alias paling korup dibandingkan negara Asia lainnya. Bahkan, dibandingkan dengan Vietnam (nilai 8,25) yang tahun sebelumnya masih menempati posisi pertama dengan nilai 9,97. Nilai yang dimiliki Indonesia (9,92) adalah nilai yang lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya (2001) yang bernilai 9,50. Tahun 2000 lalu, nilai korupsi yang dimiliki Indonesia masih tercatat 9,09 dengan tingkat kronisme bernilai 9,1.¹⁶ Artinya, korupsi yang terjadi di Indonesia memperlihatkan gejala yang semakin parah.

Laporan PERC di atas melengkapi laporan PERC tahun sebelumnya (Desember 2001) tentang peringkat negara tujuan investasi. Dengan menggunakan skor yang sama yaitu 0-10, Indonesia juga termasuk negara tujuan investasi kedua terburuk dengan skor 7,0 setelah Vietnam yang mempunyai skor 7,75. Indikator survei juga sama dengan indikator korupsi, yaitu wawancara yang digunakan adalah soal penyuapan kepada birokrasi dalam rangka investasi seperti izin usaha, ekspor-impor dan penyuapan lainnya. Artinya, PERC, dengan kedua laporannya di atas, sebenarnya ingin mengatakan bahwa buruknya Indonesia sebagai negara tujuan investasi penyebab utamanya adalah korupsi yang parah khususnya merajalelanya penyuapan dalam investasi yang harus dibayarkan kepada birokrasi.

Korupsi di Indonesia memang sedemikian adanya. Data resmi (*recorded*) memperlihatkan, nilai kerugian negara akibat penyimpangan anggaran atau korupsi, dalam tiga Tahun Anggaran (TA) naik cukup fantastis. Pada TA 2000/2001 tercatat Rp91,512 triliun atau jauh lebih tinggi dibandingkan TA 1999/2000 yang Rp8,25 triliun dan TA 1998/1999 yang nilainya Rp3,329 triliun. Angka ini belum menunjukkan angka kerugian negara yang sebenarnya lantaran dark number (angka gelap)-nya jauh lebih tinggi. *Dark number* tersebut di

¹⁵ Widiby. (2002, March 21st). *Korupsi sebagai Penghambat Pertumbuhan Investasi*. Bisnis Indonesia. <http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=22>. (diakses tanggal 8 April 2008).

¹⁶ *Ibid.*

antaranya termasuk penyuapan dalam investasi yang masuk dalam survei PERC di atas.

Kedua laporan PERC di atas, pada akhirnya memang sangat menyulitkan pertumbuhan investasi khususnya investasi asing ke Indonesia. Mengapa? Jawabnya: pertama, korupsi adalah faktor utama terjadinya ketidakpastian hukum. Padahal, faktor utama tinggi-rendahnya pertumbuhan investasi sangat ditentukan oleh faktor kepastian hukum di samping faktor stabilitas keamanan. Indikator utama kepastian hukum itu sendiri sangat ditentukan oleh tinggirendahnya tingkat korupsi. Semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara maka semakin rendah pula tingkat investasi ke negara yang bersangkutan.

Kedua, korupsi membuat para pengusaha asing menjadi ketakutan menanamkan investasinya di Indonesia. Harus disadari, para pengusaha asing telah terikat dengan kode etik (*Code of Conduct*) Kamar Dagang Internasional (*International Chamber of Commerce*) yang sejak Maret 1996 telah merekomendasikan kode etik kepada anggotanya untuk tidak melakukan korupsi dalam bisnis internasionalnya. Berkenaan dengan sanksi hukumnya, ICC menyerahkan kasusnya kepada Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization for Economic Cooperation and Development*), yang anggotanya tercatat 29 negara maju yang menaungi perusahaan multinasional. Pada pertemuan Paris (26 Mei 1997), negara yang bergabung dalam OECD mensahkan UU Anti Penyuapan (*Bribery*) yang berlaku bagi anggotanya.¹⁷

Berdasarkan UU tersebut, perusahaan multinasional anggota OECD, yang terbukti melakukan penyuapan atau berkolusi dengan birokrasi, untuk mendapatkan proyek atau menanamkan investasi, maka perusahaan tersebut dapat diajukan ke pengadilan di negara perusahaan tersebut berasal. Misalnya, perusahaan Amerika Serikat (AS), sebagai anggota OECD, yang melakukan korupsi di luar negeri dikenai *Foreign Corrupt Practices Act* (UU Praktek Korupsi di Luar Negeri) yang sudah diundangkan sejak 1977 dan di-amandemen pada 1988.

Ketiga, para pengusaha multinasional sendiri kini juga sangat menyadari bahwa investasi di negara-negara yang korup sangat merugikan dirinya. Banyak

¹⁷ *Ibid.*

kasus yang memperlihatkan bahwa investasi mereka pada negara-negara yang korup, dengan dalih nasionalisme, dijarah oleh pejabat yang korup untuk kepentingan pribadi dan kepentingan politiknya. Karena itu, kini, para pengusaha asing sejak awal sudah terdorong untuk tidak menanamkan investasi di negara-negara yang korup.

Paolo Mauro, dalam studinya,¹⁸ berkesimpulan bahwa korupsi secara langsung dan tidak langsung adalah penghambat pertumbuhan investasi. Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia, menyadari bahwa substansi korupsi di suatu negara adalah ancaman serius bagi investasi yang ditanam.¹⁹

Di Indonesia sendiri memang belum ada penelitian yang menghubungkan antara korupsi dengan pertumbuhan investasi. Namun, dapat dipastikan menurunnya pertumbuhan investasi belakangan ini penyebab utamanya adalah makin parahnya korupsi di Indonesia. Yang jelas terdapat korelasi antara peringkat korupsi Indonesia dengan menurunnya realisasi investasi asing ke Indonesia. Ketika pada awal tahun 2001 lalu PERC melaporkan peringkat korupsi Indonesia pada urutan kedua terkorup di Asia setelah Vietnam, realisasi investasi yang tahun sebelumnya (2000) tercatat US\$15,4 miliar langsung anjlok hingga 41,6% menjadi hanya US\$9 miliar. Tahun 2000 sendiri Indonesia menempati peringkat ketiga terkorup di Asia. Akankah realisasi investasi asing akan semakin menurun seiring dengan peringkat Indonesia sebagai negara terkorup (nomor satu) di Asia? Jawabnya: sangat mungkin.

III.2 Faktor-Faktor Pembentuk Competitive Advantage

Kondisi yang perlu di perhatikan dari turunnya iklim investasi di Indonesia adalah kondisi dari investor itu sendiri, yaitu Jepang. Hal yang umum diketahui adalah kemampuan ekonomi dari MNC sendiri tidak terlepas kondisi perekonomian yang terjadi di negara investor. Kondisinya seringkali determinan terhadap MNC yang terkait karena hal ini akan berhubungan dengan modal-modal ekonomis maupun non-ekonomis yang dihasilkan oleh sistem perekonomian

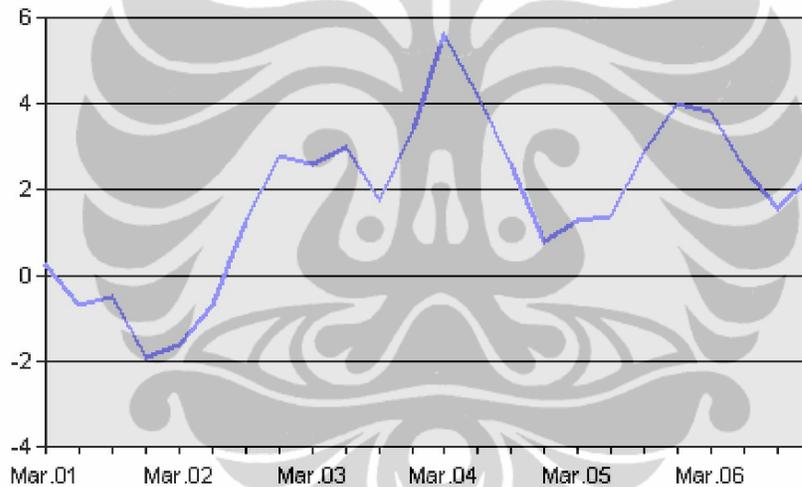
¹⁸ Mauro, Paolo. *Dampak Korupsi pada Pertumbuhan Investasi dan Belanja Pemerintah: Sebuah Analisis Lintas Negara*. Bisnis Indonesia (21 Maret 2002).

¹⁹ Elliot, Kimberly Ann. *Korupsi dan Ekonomi Dunia*. Yayasan Obor Indonesia, 1999, hal; 148.

negara asal MNC.

Setelah mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia dari [1960-an](#) ke [1980-an](#), ekonomi Jepang memelan secara drastis pada awal [1990-an](#), ketika "[ekonomi gelembung](#)" jatuh. Persediaan kepemimpinan industri dan teknisi, pekerja yang berpendidikan tinggi dan bekerja keras, tabungan dan investasi besar dan promosi intensif pengembangan industri dan perdagangan internasional telah memproduksi ekonomi industri yang matang. Jepang memiliki sumber daya alam yang rendah, tetapi perdagangan menolongnya mendapatkan sumber daya untuk ekonominya.

Kondisi perekonomian Jepang dapat dilihat pada grafik di halaman berikut ini:²⁰



Gambar III.1

Pertumbuhan Ekonomi Jepang Tahun 2001-2006

Sumber : Bank Indonesia

Kondisi perekonomian ini memberi gambaran bahwa Jepang cenderung mengalami naik turun perekonomiannya dengan perlahan. Dampak yang terjadi dengan Indonesia adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Jepang diprediksi terus

²⁰ *Pertumbuhan Ekonomi Jepang*, <<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik>>, (diakses tanggal 4 Mei 2008)

melambat akibat penurunan investasi sektor perumahan dan ketidakpastian ekonomi global.²¹

Michael Porter dalam bukunya, *The Competitive Advantage of Nations* yang diterbitkan oleh Free Press tahun 1990, mengungkapkan bahwa keunggulan kompetitif suatu bangsa sudah bergeser dari hal-hal yang sifatnya kasat mata seperti sumber daya alam, ke arah penciptaan dan asimilasi pengetahuan.²² Dengan perkataan lain, Porter juga mengatakan bahwa keunggulan kompetitif suatu bangsa saat ini, sangat ditentukan oleh kapasitas belajarnya. Konsep keunggulan kompetitif Porter mensyaratkan penciptaan dan asimilasi pengetahuan ini sebagai ujung tombak inovasi. Inovasi inilah yang akan memberikan keunggulan kompetitif. Bangsa yang tenggelam dengan kejayaan masa lalu dan sulit berinovasi, tidak akan pernah mencapai suatu keunggulan kompetitif.

Disini akan dijelaskan bagaimana faktor pembentuk *competitive advantage* Jepang memberikan dampak terhadap terjadinya fluktuasi tingkat investasi Jepang ke Indonesia. Selanjutnya akan dikaitkan dengan *comparative advantage* Indonesia yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya.

Faktor pertama pembentuk *competitive advantage* adalah faktor *conditions* yang terdiri atas:

1. Sumber Daya Manusia

Jepang merupakan negara dengan kuantitas SDM yang cukup besar dengan populasi mencapai angka mencapai angka lebih dari 127 juta jiwa.²³ Namun tingginya populasi Jepang tidak selalu memperlihatkan adanya jaminan akan ketersedianya tenaga kerja yang mampu memenuhi kebutuhan perekonomian Jepang. Selain itu, tingginya tingkat upah tenaga kerja domestik mengakibatkan dampak yang cukup besar bagi sistem produksi domestik Jepang. Tingginya upah tenaga kerja disebabkan tingkat pendidikan di Jepang yang tinggi. Secara umum telah diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka tingkat upah tenaganya juga menjadi tinggi. Pendidikan tinggi memberi gambaran umum akan kemampuan dan ketrampilan pada tenaga kerja. Meningkatnya biaya

²¹ <<http://www.kompascetak.com/ver1/Ekonomi/0801/10/231348.htm>>, (diakses tanggal 21 Maret 2008)

²² Porter, Michael. E, *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press. 1990.

²³ <http://www.id.emb-japan.go.jp/expljp_02.html>, (diakses tanggal 21 Maret 2008).

produksi menyebabkan harga produksi domestik Jepang meningkat, sehingga sulit bagi Jepang untuk bersaing dengan negara lain. Atas dasar itulah, kebutuhan akan tenaga kerja berupah rendah menjadi suatu hal yang penting. Undang-undang Jepang yang cenderung kaku dan adanya batasan dalam penggunaan tenaga kerja asing menjadi suatu hambatan dalam memperoleh tenaga kerja asing berbiaya murah di wilayah Jepang. Alasan inilah yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan untuk mengadakan investasi keluar negeri, termasuk ke Indonesia.

2. Sumber Daya Fisik

Sumber daya ini mengarah kepada ketersediaan lahan dan sumber daya alam. Bentuk dari kontur geografis Jepang menyebabkan adanya keterbatasan dalam ketersediaan lahan potensial. Selain itu, sumber daya fisik yang perlu dijelaskan adalah ketersediaan sumber daya alam Jepang yang kurang karena kondisi alam Jepang yang memang tidak memiliki banyak sumber daya alam. Selain itu, wilayah Jepang dengan bukit dan dataran mengakibatkan pengelolaan industri-industri yang membutuhkan lahan mengalami kesulitan dikarenakan luas lahan yang terbatas dan tinggi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan akses penggunaan lahan. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel halaman berikut:²⁴

²⁴ *Census of Japan: Land Area and Land Utilization, (1983-2000)*, <<http://jinjapan.org/stat/stats/01CEN11.html>>, (diakses pada tanggal 12 Juni 2008)

Tabel III.3

Wilayah Daratan Dan Utilisasi Wilayah Daratan Jepang (1983-2000)

Thn	Luas Daratan (juta hektar)	Utilisasi Wilayah Daratan (%)					
		Lahan Pertanian	Hutan	Padang Rumput	Wilayah Perairan	Jalan	Lahan Bangunan
1983	37,78	14,7	66,9	0,8	3,1	2,8	3,8
1984	37,78	14,7	67	0,8	3,5	2,8	3,9
1985	37,78	14,7	67	0,8	3,4	2,8	4
1986	37,78	14,7	66,9	0,8	3,5	2,9	4
1987	37,78	14,7	66,9	0,8	3,5	2,9	4,1
1988	37,7	14,7	66,9	0,7	3,5	3	4,2
1989	37,7	14,7	66,9	0,7	3,5	3	4,2
1990	37,7	14,7	66,8	0,7	3,5	3	4,3
1991	37,78	14,7	66,8	0,7	3,5	3	4,3
1992	37,78	14,7	66,7	0,7	3,5	3,1	4,4
1993	37,78	14,7	66,6	0,7	3,5	3,1	4,4
1994	37,78	14,7	66,6	0,7	3,5	3,1	4,5
1995	37,78	14,7	66,5	0,7	3,5	3,2	4,5
1996	37,78	14,7	66,5	0,7	3,5	3,2	4,6
1997	37,78	14,7	66,5	0,7	3,5	3,2	4,6
1998	37,78	14,7	66,4	0,7	3,5	3,3	4,7
1999	37,78	14,7	66,4	0,7	3,5	3,3	4,7
2000	37,78	14,7	66,4	0,7	3,5	3,4	4,7

Sumber: White Paper on National Land (Ministry of Land, Infrastructure, and Transport), Juni 2002

Yang dapat dilihat dari tabel diatas adalah yang pertama jika melihat dari tingkat utilisasi lahan, hanya sekitar 45% dari wilayah Jepang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Lalu sekitar 65% wilayahnya adalah wilayah hutan, padang rumput, perairan dimana wilayah-wilayan ini sulit untuk dijadikan pemukiman ataupun pengembangan proses pembangunan. Jepang. Selain itu, data diatas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan pengembangan

lahan tidak mengalami pertumbuhan yang berarti, Sementara itu, penggunaan lahan untuk pertanian mengalami penurunan.

3. Sumber Pengetahuan

Hal ini mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh Jepang. Ini dapat dilihat dari pola aktivitas ekonomi suatu negara, semakin tinggi tingkat ilmu pengetahuan, maka tingkat ekonominya akan cenderung berteknologi tinggi. Pendidikan dan keterampilan tinggi yang dimiliki Jepang, memberi kontribusi akan peningkatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Jepang terutama berhubungan dengan sektor industri Jepang.

Faktor kedua yaitu *demand conditions*. Faktor ini merujuk pada kondisi apakah pasar Jepang mampu menciptakan kondisi yang kondusif terhadap peranan MNC Jepang di luar negeri. Pemerintah Jepang memiliki kecenderungan untuk mengadakan kontrol terhadap kondisi pasar di Jepang, terutama dengan adanya perlindungan produk di sektor tertentu. Namun hal ini tidak terlalu nyata, karena Jepang memiliki keunggulan yang sulit dimiliki negara lain yaitu teknologi. Namun seiringnya waktu, Jepang mengalami sedikit ancaman apabila negara lain dapat menciptakan teknologinya sendiri. Ini berarti, akan terjadi kompetisi dari produk yang dihasilkan, dimana kondisi ini akan menyulitkan perekonomian Jepang yang selama ini cenderung terlindungi dari tingkat kompetisi di luar.

Faktor ketiga adalah *related and supporting industries*. Faktor ini memperlihatkan bahwa semakin besar kebutuhan akan faktor produksi dan distribusi dapat dipenuhi oleh adanya perusahaan-perusahaan lain yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka suatu perusahaan akan mampu menjalankan fungsinya dengan lebih mudah.

Faktor keempat adalah pembahasan mengenai strategi, struktur dan persaingan antar perusahaan di Jepang. Hal tersebut mempunyai dampak yang besar bagi *competitive advantage* Jepang, karena ketiga hal tersebut memiliki pengaruh terhadap tingkat kompetitif perusahaan Jepang dalam menghadapi persaingan di pasar. Melihat pada sistem produksi, Jepang memiliki sistem atas manajemen produksi, pengembangan produksi, hubungan antar-perusahaan dan ketrampilan intelektual di lapangan. Empat hal ini memiliki keterkaitan dalam

terciptanya *competitive advantage* perusahaan Jepang, terutama dalam hal MNC Jepang.

Faktor kelima adalah faktor *government* atau pemerintah. Ekonomi Jepang tidak bisa lepas dari peranan pemerintah terhadap sektor-sektor ekonomi Jepang, terlebih pada investasing asing Jepang. Pemerintah Jepang memiliki peran aktif dalam sektor ekonomi. Hal ini dipercaya karena ekspor memiliki dampak positif terhadap pembangunan ekonomi, memerlukan dukungan dan perhatian khusus semenjak industri mempunyai prospek untuk berkembang.

Faktor terakhir yaitu kesempatan. Faktor ini tergolong unik dikarenakan kesempatan sesungguhnya dimiliki oleh Jepang pasca krisis yaitu adanya potensi besar bagi peningkatan aktivitas MNC Jepang. Hal ini terutama dikarenakan negara-negara berkembang di Asia cenderung terbuka terhadap investasi dari luar negeri. Negara-negara tersebut membutuhkan dana besar untuk pemulihan dan pembangunan perekonomian. Pada kenyataannya terjadi penurunan tingkat investasi Jepang di Indonesia. Apabila merujuk pada pembahasan sebelumnya mengenai *comparative advantage* Indonesia, maka sesungguhnya menurunnya *comparative advantage* Indonesia dapat dikatakan memiliki dampak yang cukup besar bagi penurunan investasi Jepang. Hubungan antara *comparative advantage* Indonesia dan *competitive advantage* Jepang akan dibahas pada bagian berikutnya.

III.3 Pengaruh Comparative dan Competitive Advantage Terhadap Fluktuasi Investasi Jepang di Indonesia

Masalah daya saing dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan isu kunci dan tantangan yang tidak ringan. Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan saing yang tinggi niscaya produk suatu negara, termasuk produk Indonesia, tidak akan mampu menembus pasar internasional. Bahkan masuknya produk impor dapat mengancam posisi pasar domestik. Dengan kata lain, dalam pasar yang bersaing, keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) merupakan faktor yang desisif dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan daya saing dan membangun keunggulan kompetitif bagi produk Indonesia tidak dapat ditunda-tunda lagi dan sudah selayaknya menjadi

perhatian berbagai kalangan, bukan saja bagi para pelaku bisnis itu sendiri tetapi juga bagi aparat birokrasi, berbagai organisasi dan anggota masyarakat yang merupakan lingkungan kerja dari bisnis *corporate*.

Aktivitas dan tingkat investasi asing yang terjadi antar dua negara didasarkan oleh *comparative advantage* negara tujuan investasi dan juga *competitive advantage* dari negara investor. Pada dasarnya tujuan diadakannya investasi oleh negara investor adalah untuk meningkatkan laba, baik dengan cara mengamankan akses pasar bagi produksinya ataupun mengamankan akses pasokan sumber produksi untuk menekan biaya produksinya dengan harapan komoditas yang dihasilkan dapat bersaing dengan komoditas sejenis yang dihasilkan oleh pihak lain.

Apa yang terjadi dalam tingkat fluktuasi PMA Jepang di Indonesia pada dasarnya diakibatkan oleh adanya penurunan *comparative advantage* Indonesia sebagai negara tujuan investasi serta adanya penurunan *competitive advantage* Jepang sebagai negara investor. Bagaimana *comparative advantage* Indonesia dan *competitive advantage* Jepang mempengaruhi tingkat PMA Jepang di Indonesia?

Jika dilihat lagi pada tahap awal di bab III, *comparative advantage* Indonesia pada dasarnya mengalami penurunan pada hal SDA, SDM, *country risk* serta *opportunity cost*. Keempat hal tersebut merupakan faktor yang memiliki signifikansi tinggi terhadap pertimbangan investor untuk menanamkan investasi di Indonesia. Ini dikarenakan pada dasarnya sektor perekonomian Indonesia digerakkan oleh sektor-sektor yang menyerap SDM dengan tingkat upah dan ketrampilan rendah serta SDA.

Secara teoretis, investasi dipahami sebagai faktor penting yang merupakan motor atau lokomotif ekonomi dan peranannya relatif lebih penting dibandingkan faktor-faktor lainnya. Hal ini dikarenakan investasi yang ada dan yang baru masuk akan meningkatkan proses produksi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyerap tenaga kerja. Aspek ketenagakerjaan ini sangat penting di Indonesia mengingat jumlahnya sangat besar dan masih sulit dipecahkan selama ini. Karena itu, dinamika investasi yang ada diharapkan dapat membantu memecahkan masalah ketenagakerjaan.

Terlepas dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusia,

permasalahan faktor krisis ekonomi Asia 1997 yang melanda Indonesia masih menjadi faktor penting dalam permasalahan investasi ini. Hal ini berlanjut pada masalah *political risk* yang meningkat sebagai akibat terjadinya berbagai permasalahan. Selain itu masih ditambah pada kondisi keamanan dalam negeri masih terus dipertanyakan oleh pihak investor. Hal ini merupakan faktor negatif dan dapat menggajal upaya-upaya untuk menarik investasi yang telah dilakukan presiden. Peristiwa tersebut seolah membuyarkan harapan banyak kalangan agar Indonesia nyaman kembali bagi tujuan modal dan investasi. Sudah jelas bahwa rangkaian teror dan yang terakhir adalah bom, mungkin sekali akan menurunkan minat investasi di Indonesia. Faktor keamanan jelas sangat signifikan pengaruhnya. Serangkaian peledakan bom jelas berpengaruh negatif terhadap minat investasi di Indonesia. Padahal, negara yang cukup aman tentu akan mendapatkan komitmen untuk menjadi tempat dalam melakukan investasi.

Salah satu penyebab turunnya ketertarikan Jepang berinvestasi di Indonesia adalah masalah kebijakan, khususnya lagi yaitu pada kebijakan perpajakan Indonesia. Bahkan menurut data yang ada, di tahun 2001 terdapat 401 buah perusahaan Jepang yang akan berinvestasi ke luar negara Jepang dengan jangka waktu tiga tahun kedepan dan hanya 56 perusahaan yang memilih Indonesia sebagai negara tujuan investasi.²⁵

Sektor perekonomian Indonesia mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan industrinya dalam hal padat karya yang diakibatkan oleh karakteristik tenaga kerja Indonesia. Selain itu sumber daya alam juga saling berkaitan sebagai faktor produksi yang penting pula. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik Indonesia bagi para investor, tak terkecuali oleh Jepang. Jepang pada akhirnya memiliki keuntungan sendiri atas investasinya di Indonesia karena Jepang tidak mampu menghasilkan produk yang cenderung memerlukan jumlah SDM yang relatif besar.

Hal yang lain lagi yaitu keterbatasan SDA Jepang sendiri serta tingginya biaya kesejahteraan dan upah tenaga kerja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk pemenuhan kebutuhan faktor produksi berupa SDM

²⁵ HK, *Singapore Best Judicial Systems, RI the Worst*, 3 Juni 2005. Jakarta: Harian The Jakarta Post. <<http://www.thejakartapost.com/>>, (diakses tanggal 9 September 2008)

dengan biaya rendah, maka alokasi perusahaan Jepang ke negara lain dengan bentuk investasi dapat terjadi.

Perubahan dalam hal *country risk* juga mempengaruhi tingkat investasi asing. Yang terjadi di Indonesia adalah semakin meningkatnya beban politik yang berpengaruh pada sistem produksi MNC di Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan adalah perlu diadakannya sistem hukum dan administratif yang memadai untuk melindungi aktivitas ekonomi di Indonesia, yang mana tidak hanya bagi pihak asing, namun juga bagi pihak dalam negeri. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan kepentingan pihak tertentu didalam sektor perekonomian Indonesia.

Permasalahan akibat krisis ekonomi Asia di Indonesia masih memiliki dampaknya hingga kini. Walau pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya untuk menarik investor, namun tetap saja ada hal-hal lain yang menjadi perhatian investor Jepang dalam mempertimbangkan daerah investasinya. Hal ini berkenaan dengan kondisi moneter Indonesia yang mengalami depresi mata uang, inflasi juga kenaikan tingkat suku bunga. Depresiasi memberi kesempatan bagi MNC Jepang untuk meningkatkan produksi.

Hubungan antara *comparative advantage* Indonesia dan *competitive advantage* Jepang sesungguhnya didasari oleh adanya kepentingan ekonomi. Kedua negara sama-sama memiliki kepentingan ekonomi. Hal ini didukung pula pada upaya Jepang untuk memperlancar aliran investasinya di Indonesia. Salah satunya dengan cara pemberian bantuan ODA.

Yang terjadi pada krisis ekonomi Asia 1997 telah berakibat menurunnya tingkat perekonomian Indonesia yang juga berakibat pada penurunan daya beli masyarakat, sehingga secara tidak langsung potensi pasar MNC Jepang di Indonesia menjadi berkurang. Kondisi perubahan ini berdampak juga bagi *competitive advantage* Jepang. Beban yang ditanggung MNC menjadi semakin meningkat karena adanya kegagalan MNC Jepang untuk meneruskan aktivitasnya secara normal di Indonesia. Selain itu masalah depresiasi nilai mata uang mengakibatkan semakin besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengadakan impor.

Satu hal unik yang perlu diperhatikan dari hubungan *comparative advantage* Indonesia dan *competitive advantage* Jepang adalah bagaimana hubungan kondisi ekonomi domestik masing-masing negara mampu memberikan pengaruh terhadap kerjasama ekonomi di antara keduanya. Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa keterkaitan antar faktor-faktor tersebut ternyata memberikan dampak bagi tingkat PMA Jepang di Indonesia. Penurunan *comparative advantage* Indonesia tidak lagi mampu untuk mendukung kebutuhan dari kepentingan ekonomi Jepang, sementara itu ketidakmampuan Indonesia untuk memenuhi kepentingan ekonomi Jepang akhirnya memberikan dampak negatif bagi *competitive advantage* Jepang. Sehingga terlepas dari kondisi yang memberikan kesempatan bagi Jepang untuk meningkatkan investasinya di Indonesia sehubungan dengan krisis ekonomi Asia 1997 yang terjadi, maka penurunan PMA Jepang di Indonesia merupakan konsekuensi wajar dari ketidakmampuan Indonesia untuk mengakomodir kebutuhan investor, dalam hal ini Jepang. Serta ketidakmampuan Jepang untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang dihasilkan dari kombinasi peningkatan beban ekonomi domestiknya, penurunan *comparative advantage* Indonesia serta efek krisis ekonomi Asia 1997 yang mempengaruhi proses produksi dan distribusinya.

III.4 Comparative Advantage Investasi Jepang Dan Malaysia

Adanya faktor pembentuk *comparative advantage* pada Indonesia membuat penulis untuk mengetahui perbandingan faktor tersebut dengan salah satu negara ASEAN yang sama-sama menjadi tujuan besar investasi Jepang, yaitu Malaysia. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1957, hubungan kedua negara antara Jepang dan Malaysia yang juga dimulai pada tahun yang sama. Malaysia sudah melaksanakan kebijaksanaan liberal untuk mendapatkan modal masuk dari FDI. Negara Malaysia melihat konteks mengenai FDI sebagai suatu kegiatan perusahaan yang mendirikan anak perusahaannya dan cabangnya di Malaysia. Salah satu contoh investasi luar negeri secara langsung adalah munculnya perusahaan multinasional. Perusahaan ini beroperasi di Malaysia melalui cabangnya, dibawah pengawasan perusahaan induk yang terdaftar di negara maju. Adapun ketertarikan para investor luar negeri untuk berinvestasi ke Malaysia

dikarenakan adanya penawaran yang luas kepada bidang perminyakan, ketersediaan tenaga kerja dan harga tanah di wilayah Malaysia.

Jepang merupakan salah satu negara mitra dagang terbesar bagi Malaysia, Selain itu, Malaysia merupakan mitra FTA ketiga untuk Jepang menyusul Singapura dan Meksiko. Ekspor Jepang ke Malaysia termasuk pada barang industri, peralatan elektronik dan peralatan transportasi. Bagi Jepang, Malaysia merupakan negara pensuplai bahan baku alam seperti kayu dan gas alam. Selain sebagai mitra dagang utama Malaysia, Jepang juga berperan penting pada investasi langsung. Sebagai contoh, bahwa Malaysia telah menerima total investasi Jepang dari tahun 1995 sampai 2000 sebesar USD3,314 billion.²⁶

Setelah Malaysia mengalami stagnansi selama beberapa tahun, investasi Jepang ke Malaysia meningkat secara substansial ditahun 2006. Untuk mengetahui jumlah investasi yang dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut ini:²⁷

Tabel III.4
Tabel Jumlah Investasi Jepang ke Malaysia periode 2001-2006
(dalam US\$ Dollar)

Tahun	Jumlah Investasi
2001	1,449,685,341.2
2002	170,193,059.05
2003	376,918,188.713
2004	265,962,100
2005	797,912,991
2006	1,202,066,209

Peningkatan yang terjadi di tahun 2006 tersebut dikarenakan kesepakatan EPA antara Jepang dan Malaysia yang terjadi di bulan Desember 2005. Selain itu, pengusaha Jepang saat itu memilih untuk menanamkan modalnya di Malaysia,

²⁶ *Japanese Foreign Aid Policy Toward Malaysia*. Menteri Perdagangan Malaysian, Rafidah Aziz, <<http://www.japanesestudies.org.uk/articles/2007/FuruokaLoKato.html>>, (diakses tgl 20 Oktober 2008).

²⁷ <<http://www.mida.gov.my/en/view.php?cat=13&scat=2129>>, (diakses 12 September 2008).

Vietnam dan India yang dinilai lebih aman dan kondusif iklim usahanya.²⁸ Sedangkan para pengusaha Jepang, mereka masih melihat Indonesia tidak aman dan iklim usaha untuk investasi asing masih kurang kondusif. Kesepakatan atas kesuksesan yang terjadi pada kedua belah pihak Investasi dari Jepang ke Malaysia meningkat pesat di tahun 2006 sebagai rekor baru selama lima tahun terakhir.



²⁸ *Investor Jepang Pilih Investasi di Malaysia, Vietnam dan India*, Direktur Informasi dan Kebudayaan Kedubes Jepang Yoshiharu Kato, Rabu, 22 Februari 2006, <<http://www.kompas.com/h/0000104253.html>>, (diakses tgl 22 September 2008)

BAB IV

USAHA MENINGKATKAN INVESTASI JEPANG KE INDONESIA

Sejak krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1997 melanda beragam negara, di Asia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, banyak strategi, usaha, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk membawa Indonesia keluar dari situasi krisis tersebut. Untuk itu, diperlukan berbagai tindakan-tindakan, terobosan melalui pemanfaatan peluang-peluang yang tersedia dalam mempercepat penyembuhan ekonomi nasional sehingga dapat diciptakan suatu ketahanan ekonomi yang prima di masa depan. Pada upaya peningkatan investasi di wilayah nasional, langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia antara lain memanfaatkan bantuan dan juga melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga dunia melalui antara lain: melalui berbagai agenda reformasi dan melakukan restrukturisasi perekonomian.¹

IV.1 Usaha Pemerintah Indonesia Untuk Meningkatkan Investasi Jepang

IV.2.1 Dasar Peraturan Investasi Indonesia

Penanaman modal asing (PMA) menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan modal pembangunan. Di Indonesia, PMA diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) yang merupakan landasan hukum mengalirnya PMA ke Indonesia. Sejalan dengan perubahan keadaan sosial, politik dan ekonomi, diperlukan pula peraturan PMA yang mampu mempercepat perkembangan ekonomi nasional dalam mendorong tercapainya sasaran pembangunan ekonomi nasional.

Sejarah kebijakan dan kelembagaan investasi di Indonesia sudah dimulai sejak tiga dasawarsa yang lalu. Pada masa itu sudah dimulai reformasi dengan perbaikan sistem investasi melalui undang-undang. Artinya, dengan UU PMA, Indonesia mulai berorientasi ke luar negeri dengan membuka peluang ekonomi luar negeri agar masuk dan terlibat dalam proses-proses produksi di dalam negeri.

¹ *Ibid.*

Ketentuan-ketentuan investasi asing di Indonesia selama ini didasarkan pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1/1967 dengan beberapa penyesuaian UU No. 11/1970 tentang Perubahan Dan Tambahan UU No.1/1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Ketentuan-ketentuan tersebut diterapkan kepada seluruh perusahaan yang modal domestiknya kurang dari 100%.

Di lain hal, undang-undang ini menawarkan perangsang keuangan yang cukup luas bagi negara, dimana modal asing yang diambilalihnya lebih kecil dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. Perangsang tersebut kebanyakan dalam bentuk pengurangan atau pembebasan pajak (*tax holiday*) selama dua tahun untuk seluruh investasi yang diprioritaskan (yang ditetapkan secara bebas).

UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967) dikeluarkan untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional. Di Indonesia adalah wewenang BKPM untuk memberikan persetujuan dan ijin atas investasi langsung luar negeri. Dalam dekade terakhir ini pemodal asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia karena tidak stabilnya kondisi ekonomi dan politik. Kini muncul tanda-tanda bahwa situasi ini berubah: ada sekitar 70% kenaikan FDI di paruh pertama tahun 2005, bersamaan dengan tumbuhnya ekonomi sebesar 5-6% sejak akhir 2004.² Pada awal 2005, Inggris, Jepang, Cina, Hong Kong, Singapura, Australia, dan Malaysia adalah sumber-sumber FDI yang dianggap penting.

UU Penanaman Modal pertama (UU No. 1/1967) yang dikeluarkan oleh Orde Baru dibawah pemerintahan Suharto sebenarnya mengatakan dengan jelas bahwa beberapa jenis bidang usaha sepenuhnya tertutup bagi perusahaan asing. Pelabuhan, pembangkitan dan transmisi listrik, telekomunikasi, pendidikan, penerbangan, air minum, KA, tenaga nuklir, dan media masa dikategorikan sebagai bidang usaha yang bernilai strategis bagi negara dan kehidupan sehari-hari rakyat banyak, yang seharusnya tidak boleh dipengaruhi pihak asing (Pasal 6 ayat 1).

Setahun kemudian, UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No. 6/1968) menyatakan: "*Perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% daripada modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki oleh Negara dan/atau, swasta nasional*" (Pasal 3 ayat 1). Dengan kata lain,

² Nugroho, Yanuar. *Memahami Investasi Langsung Luar Negeri*. Mei, 2006. <<http://dte.gn.apc.org/fifdi.htm>>, (diakses 9 Oktober 2008).

pemodal asing hanya boleh memiliki modal sebanyak-banyaknya 49% dalam sebuah perusahaan. Namun kemudian, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah yang menjamin investor asing bisa memiliki hingga 95% saham perusahaan yang bergerak dalam bidang "... pelabuhan; produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik umum; telekomunikasi; penerbangan, pelayaran, KA; air minum, pembangkit tenaga nuklir; dan media masa" (PP No. 20/1994 Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1).

Pemerintah sangat memberi perhatian pada FDI karena aliran investasi masuk dan keluar dari negara mereka bisa mempunyai akibat yang signifikan. Di tahun 2003, telah dicanangkan sebagai tahun investasi di Indonesia (*Indonesian Investment Year 2003*). Alasan pencanangan tersebut diantaranya dikarenakan terus menurunnya nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) beberapa tahun belakangan pada saat itu. Hal ini bisa dilihat dari menurunnya kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya mencapai 17%-19%, dimana sebelum krisis di tahun 1997, rasio investasi terhadap PDB mencapai 33% (Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, 2003).³ Di samping itu isu desentralisasi juga menjadi perhatian. Memang, pencanangan tahun investasi 2003, ingin menggugah kita semua bahwa masalah investasi bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakat. Dengan adanya peningkatan investasi maka diharapkan Indonesia bisa segera keluar dari krisis yang berkepanjangan. Status

Indonesia yang *under-performers* mengindikasikan bahwa potensi kekayaan alam kita belum optimal didayagunakan. Kenyataan ini tak perlu membuat gundah. Peningkatan PMDN, walau baru sebatas persetujuan, belum realisasi - di sektor perkebunan dan industri-industri yang mengolah hasil-hasil perkebunan, sepatutnya menjadi perhatian utama pemerintah untuk menggerakkan kembali sektor riil. Di bidang inilah kita berharap banyak untuk memerangi pengangguran dan kemiskinan, sekaligus lebih menyebarluaskan pembangunan ke seantero tanah air. Kunci utamanya pembangunan infrastruktur dasar, seperti listrik, jalan, dan pelabuhan. Pemerintah mengemban tanggung jawab utama menyediakan infrastruktur dasar itu. Dalam kaitan inilah kita sangat mendambakan suatu cetak

³ *Investasi Di Indonesia*. <<http://www.zamronisalim.com/bahasa/study-research/investasi-di-indonesia.html>>, (diakses tanggal 12 Juni 2008)

biru yang komprehensif dari pemerintah pusat untuk menggerakkan potensi dalam negeri untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar.

Gencarnya ajakan Pemerintah Indonesia untuk menarik investasi asing ternyata belum dibarengi dengan sistem kebijakan, perundang-undangan, birokrasi, dan jaminan rasa aman yang memadai. Publik memandang berbagai kondisi yang ada di Tanah Air saat ini belum mendukung iklim investasi yang kondusif. Padahal, cukup tersirat harapan di benak publik bahwa masuknya investasi asing ini bisa turut membantu memulihkan kondisi perekonomian nasional yang dirasakan kian memburuk.

Undangan pemerintah kepada pihak asing untuk terus menanamkan investasi di Indonesia tak pernah henti diserukan. Bahkan, di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, tahun 2003 dicanangkan sebagai tahun investasi.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini, DPR dan pemerintah juga telah menyepakati target asumsi produk domestik bruto (PDB) tahun 2006 mencapai Rp 3.040,8 triliun, dimana angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan target PDB dalam APBN Perubahan Kedua tahun 2005 sebesar Rp 2.651,2 triliun.⁴

Selain menaruh harapan pada tingkat konsumsi masyarakat serta ekspor barang dan jasa, tampaknya optimisme pemerintah di tahun 2006 juga diletakkan pada target investasi yang diperkirakan akan tumbuh 15,2 persen.⁵

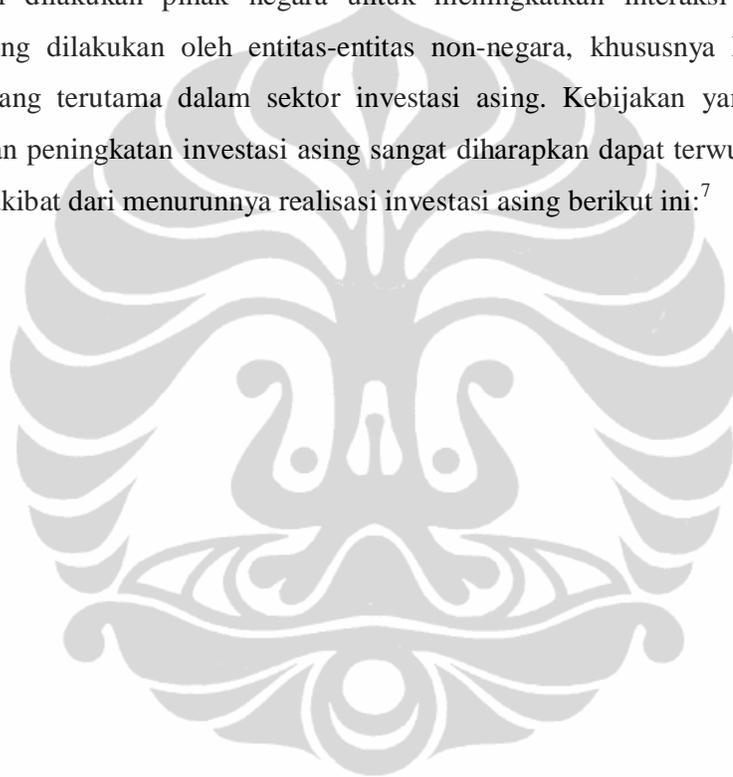
Selain itu, tanpa adanya agenda nyata pemberantasan korupsi khususnya yang selama ini menghambat investasi yaitu pemberantasan praktek-praktek "biaya siluman" yang dilakukan birokrasi korup. Tanpa tindakan pemberantasan korupsi, harapan meningkatnya realisasi investasi asing tahun ini nampaknya hanya angan-angan belaka. Thailand dapat dijadikan contoh. Thailand melancarkan "gerakan sapu bersih" pada birokrasi yang menghambat investasi asing. Hasilnya, Thailand cukup berhasil menarik investasi asing dengan nilai miliaran dolar AS. Dan pada tahun 2001 lalu, Bank Dunia (*World Bank*) dan

⁴ Satrio, B.E. *Mencemaskan Masuknya Investasi Asing*. Jakarta: *Kompas*.4 Februari 2006. <http://www.fiberindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=2>, (diakses tanggal 10 Oktober 2008).

⁵ Ibid.

Asian Development Bank (ADB) memuji lantaran langkah-langkah berani dalam memberantas korupsi yang dilakukan pemerintah Thailand.⁶

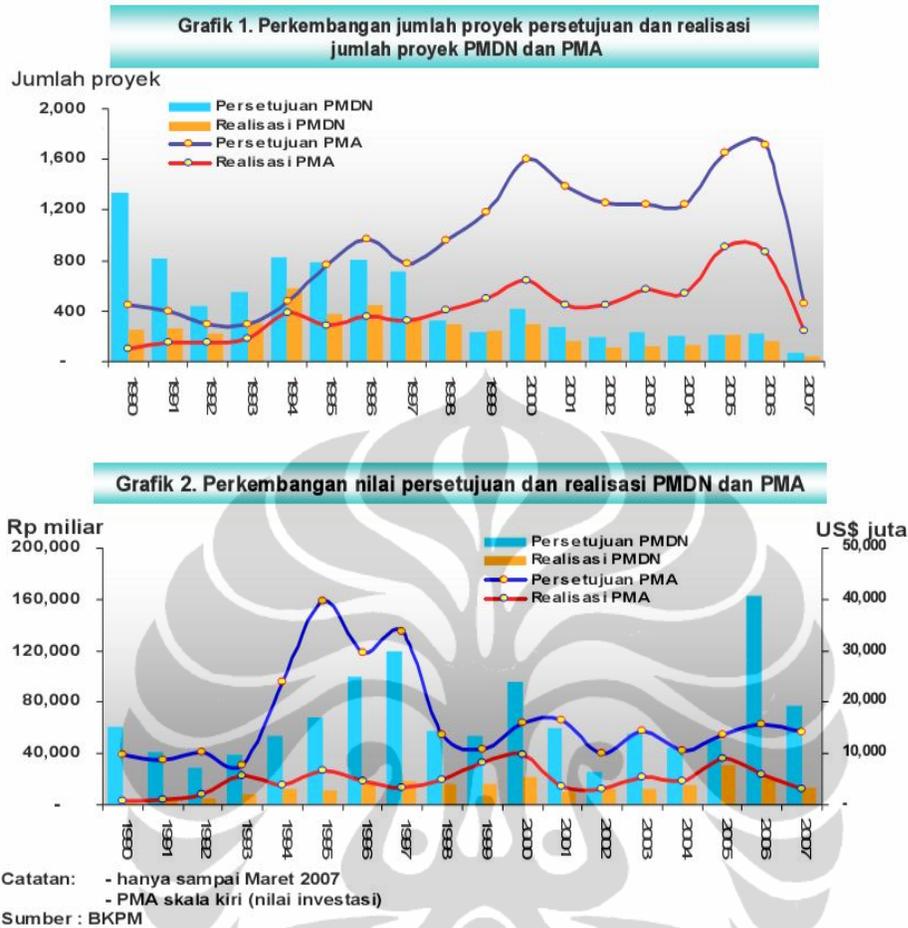
Langkah-langkah yang dilakukan Indonesia untuk menarik investasi asing merupakan suatu bukti adanya kepentingan Indonesia terhadap keberadaan investasi asing di Indonesia. Hal ini memperlihatkan adanya suatu upaya untuk melangsungkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara investor. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Indonesia baik secara domestik maupun internasional dilakukan pihak negara untuk meningkatkan interaksi-interaksi ekonomi yang dilakukan oleh entitas-entitas non-negara, khususnya MNC di Indonesia yang terutama dalam sektor investasi asing. Kebijakan yang dapat menghasilkan peningkatan investasi asing sangat diharapkan dapat terwujud. Hal ini sebagai akibat dari menurunnya realisasi investasi asing berikut ini.⁷



Gambar IV.1

⁶ Widiby. *Korupsi Sebagai Penghambat Pertumbuhan Investasi*. Bisnis Indonesia. 21 Maret 2002. <http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=22>, (diakses tanggal 20 November 2008).

⁷ Basar, Adhi. *Kebijakan Investasi Baru untuk Pertumbuhan Ekonomi*. <[http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Ulasan%20Ekonomi/Artikel%20Ekonomi%20dan%20Bisnis/investasi%20\(tulisan%20Adhy%20B\).pdf](http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Ulasan%20Ekonomi/Artikel%20Ekonomi%20dan%20Bisnis/investasi%20(tulisan%20Adhy%20B).pdf)>, (diakses tanggal 12 Juni 2008).



Gambar IV.2

IV.1.2 Kebijakan Pemerintah Melalui Presiden

Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2003 tertanggal 15 September 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerja sama dengan IMF.⁸ Paket kebijakan ekonomi tersebut memiliki tiga sasaran pokok, yakni memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro yang sudah dicapai, melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan, serta meningkatkan investasi, ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

⁸ Hidayat, Khomarul & Ashar, Syamsul. *Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi: Dimungkinkan Pengawasan Dari Pihak Independen*. 2003. <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0309/16/eko06.html>> (diakses tanggal 28 Oktober 2008).

Secara garis besar, Program Stabilisasi Ekonomi Makro ini sasarannya adalah untuk mencapai posisi keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan (fiscal sustainability), penurunan laju inflasi ke tingkat yang rendah setara dengan mitra-mitra dagang Indonesia, serta terpeliharanya cadangan devisa yang cukup dalam jangka menengah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan fiskal diarahkan kepada penurunan defisit APBN secara bertahap untuk mencapai posisi keseimbangan pada 2005-2006, pengurangan stok utang pemerintah terhadap PDB hingga mencapai posisi yang aman, reformasi dan modernisasi sistem perpajakan nasional untuk mengembangkan sumber penerimaan negara yang handal, peningkatan efisiensi belanja negara, serta pengembangan sistem pengelolaan utang pemerintah yang efektif.

Sementara, Program Restrukturisasi dan Reformasi Sektor Keuangan, meliputi memantapkan sistem pengaman sektor keuangan (FSN) melalui persiapan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan, pembakuan mekanisme *lender of last resort* Bank Indonesia, dan penguatan sistem keuangan melalui persiapan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu juga melanjutkan program restrukturisasi dan penyehatan perbankan, baik bank-bank BUMN, bank-bank di bawah BPPN dan bank-bank lain, memantapkan penanganan tindak pidana pencucian uang, meningkatkan kinerja pasar modal dan sistem pengawasannya, mengkonsolidasikan industri asuransi dan dana pensiun, meningkatkan kinerja dan *governance* BUMN-BUMN, dan memantapkan pengembangan profesi akuntan publik. Sedangkan Program Peningkatan Investasi, Ekspor dan Penciptaan Lapangan Kerja secara garis besar meliputi, penyempurnaan kerangka kebijakan investasi dan perdagangan melalui antara lain: pelayanan satu atap bagi investor dan pembentukan Tim Nasional Peningkatan Investasi dan Ekspor untuk menangani masalah lintas sektor; meningkatkan kepastian hukum melalui revisi UU Kepailitan dan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi atau yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pada era pemerintahan SBY, kembali dikeluarkan Paket Kebijakan Iklim Investasi tanggal 31 Agustus 2005, yang secara garis besar berisi; 1)

ditetapkannya mekanisme baru dalam pemberian subsidi bagi Pertamina baik pengadaan BBM, 2) Mewajibkan BUMN menempatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) pada bank-bank di Indonesia, 3) Pemerintah akan memperkuat cadangan devisa melalui peningkatan nilai *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) dalam kerangka kerjasama ASEAN dan Cina, Jepang dan Korea. 4) Penyediaan kebutuhan valas untuk BUMN diluar Pertamina, seperti PLN, akan dilakukan melalui bank-bank umum dan 5) penerapan secara efektif PBI No. 7/14/PBI/2005 per 14 Juli 2005 tentang pembatasan transaksi rupiah dan kredit valuta asing oleh bank, demi mengurangi kegiatan spekulasi di pasar valas.

Kebijakan ini kemudian disusul kembali dengan hadirnya Paket Insentif 1 Oktober 2005 yang merupakan bagian integral dan implementasi serta tindak lanjut dari Paket Kebijakan 31 Agustus 2005 serta paket insentif Januari 2006.⁹ Cakupan dari kebijakan ini adalah, Paket Insentif Fiskal, Reformasi regulasi dalam sektor perdagangan, Reformasi regulasi dalam sektor perhubungan, Inpres perberasan tentang harga pemberian beras oleh pemerintah dan Subsidi langsung tunai. Hal substansial yang berkaitan dengan kebijakan investasi adalah berkenaan dengan pembebasan bea masuk untuk beberapa produk, yang meliputi ; 0% untuk bahan baku dan komponen industri alat-alat berat, pembebasan bea masuk atas impor Engine Assy untuk angkutan umum, pembebasan bea masuk untuk *converter kit* untuk energi, percepatan pembatalan perda mengenai pajak dan retribusi yang menghambat dunia usaha dan investasi.

Hadirnya Kepres No. 87 tahun 2003 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI) yang diketuai langsung oleh presiden, juga dirasakan belum mampu menghadirkan pelayanan birokrasi yang efektif. Timnas PEPI yang memiliki tugas utama untuk merumuskan, mengkaji dan menetapkan kebijakan-kebijakan peningkatan investasi dan ekspor, ternyata belum cukup mampu untuk menghadirkan pelayanan birokrasi pada satu atap, sehingga semakin memperpanjang jarus birokrasi dalam berinvestasi.

Pada sisi lain, keberadaan BKPM dalam wilayah teknis sering kali juga dianggap sebagai faktor penghambat investasi, mengingat tidak sinkronnya kebijakan pembangunan atau investasi antar departemen dengan BKPM sendiri.

⁹ *Paket Insentif 1 Oktober 2005*, <<http://www.beacukai.go.id/news/Paket%20Insentif.pdf>>. (diakses 12 Agustus 2008).

Sebagai sebuah contoh adalah sistem perijinan dan pengaturan. Sistem perijinan dan pengaturan seringkali menggunakan piranti utama yaitu pemerintah, yang dimulai dari pemerintah pusat sampai dengan pada level pemerintahan dibawahnya. Berdasarkan temuan Bank Dunia 2005, lamanya waktu perijinan untuk memulai usaha di Indonesia adalah 115 hari dengan mengharuskan untuk melewati berbagai palang pintu birokrasi dan instansi.

Lemahnya aspek kelembagaan tersebut tentunya sangat berpotensi menghambat hadirnya investasi asing di Indonesia. Untuk meningkatkan investasi di Indonesia terutama dari luar negeri diperlukan institusi yang kuat, sehingga akan melahirnya pola kepemimpinan yang mendukung kebijakan-kebijakan investasi.

Dengan demikian, yang harus dilakukan adalah membuat kebijakan reformasi birokrasi sebagai prioritas perbaikan iklim investasi, yang antara lain dilakukan dengan penyederhanaan sistem dan perijinan usaha, penurunan berbagai pungutan atau pajak yang tumpang tindih, serta transparansi biaya perijinan.

Hal lain yang harus mendapatkan penekanan adalah melakukan evaluasi dan review atas pemetaan lokasi investasi, sehingga menghadirkan instrumen kebijakan yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah menjadi aspek penting, mengingat tumpang tindihnya peruraturan pusat dan daerah akan berimplikasi pada terhambatnya arus barang dan jasa tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat.

Deregulasi dan sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah harus diletakkan pada dasar kewenangan dan tanggung jawab, baik dari sisi pengawasan, promosi atas potensi sumber daya dan peluang investasi serta pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam melakukan kerjasama ekonomi dengan luar negeri, dan yang tidak kalah penting adalah perubahan mendasar pada aspek perilaku birokrat dan pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga keberadaan mereka tidak menjadi predator dalam dunia bisnis dan investasi.

Dengan demikian, baik dari aspek kebijakan investasi maupun dari aspek kelembagaan dengan jelas menggambarkan buruknya iklim investasi di Indonesia.

Sehingga diperlukan upaya pemerintah melalui kebijakan-kebijakan untuk mendorong perbaikan iklim investasi mutlak diperlukan sebagai bagian dari usaha untuk menghadirkan investasi asing langsung di Indonesia. Sinergitas dan kesinambungan kebijakan antar lembaga, baik pada tingkat departemen terkait, BI, BKPM serta instansi terkait pada level pemerintah pusat maupun daerah menjadi amat penting dalam rangka mendorong hadirnya pelayanan publik yang baik dan efektif, sebagai bagian integral dari upaya melakukan perbaikan iklim investasi di Indonesia.

Sementara itu, pada masa kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan paket empat kebijakan untuk mengatasi kondisi perekonomian pada tanggal 23 Agustus 2005. Diantaranya, kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan setelah Oktober. Empat paket yang diumumkan adalah kebijakan di bidang energi, moneter, fiskal, dan bidang investasi. Presiden menegaskan, perekonomian Indonesia saat ini menghadapi dua masalah utama yakni tingginya harga minyak serta melemahnya rupiah.

Untuk kebijakan di bidang moneter, SBY menjelaskan bahwa BI telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, antara lain dengan kenaikan suku bunga dan kenaikan giro wajib minimum. Untuk kebijakan lainnya, masyarakat diminta menunggu pengumuman lebih lanjut dari BI.

Di bidang fiskal, pemerintah telah menetapkan tiga sumber pembiayaan untuk menutup defisit yang diperkirakan membengkak hingga Rp 48,3 triliun. Padahal semula angka defisit ini hanya dipatok Rp 26 triliun. Tiga sektor yang akan menutupi defisit adalah melalui penerbitan surat utang negara (SUN) dan juga obligasi internasional, privatisasi BUMN dan divestasi PPA serta pinjaman luar negeri baik bilateral maupun multilateral.¹⁰ Untuk kebijakan ekonomi lainnya yakni di bidang investasi, Presiden meminta prosedur perizinan investasi dipermudah. Namun sayangnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua presiden tidak serta merta memulihkan tingkat investasi ke Indonesia.

Dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah Indonesia mengadakan *International Infrastructure Summit* pada tanggal 17

¹⁰ Dimas.). *Presiden Keluarkan Empat Kebijakan Ekonomi*, 31 Agustus 2005. <<http://www.tempointeractive.com/hg/ekbis/2005/08/31/brk,20050831-65996.id.html>> (diakses tanggal 18 November 2008).

Januari 2005 dan BUMN summit pada tanggal 25-26 Januari 2005. Infrastructure summit menghasilkan keputusan eksplisit bahwa seluruh proyek infrastruktur dibuka bagi investor asing untuk mendapatkan keuntungan, tanpa perkecualian. Pembatasan hanya akan tercipta dari kompetisi antarperusahaan. Pemerintah juga menyatakan dengan jelas bahwa tidak akan ada perbedaan perlakuan terhadap bisnis Indonesia ataupun bisnis asing yang beroperasi di Indonesia.

BUMN summit menyatakan jelas bahwa seluruh BUMN akan dijual pada sektor privat. Dengan kata lain, artinya tak akan ada lagi barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan biaya murah yang disubsidi dari pajak. Di masa depan seluruh barang dan jasa bagi publik akan menjadi barang dan jasa yang bersifat komersial yang penyediaannya murni karena motif untuk mendapatkan laba. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan proses liberalisasi yang saat ini sedang berlangsung di semua sektor di Indonesia dan menunjukkan pentingnya FDI bagi pemerintah Indonesia. Semangat ayat-ayat dalam UUD 1945 yang bermaksud melindungi barang dan jasa publik yang bersifat strategis seakan telah sirna.

IV.1.3 Kerjasama Indonesia dan Jepang Untuk Meningkatkan Investasi Jepang Ke Indonesia

Seperti kita ketahui bahwa Jepang adalah negara industri yang maju di Asia. Banyak sekali kita temui perusahaan-perusahaan besar multinasional Jepang yang telah mendunia. Diantaranya yang terkenal adalah: Sony, Honda, Hitachi dan sebagainya. Jepang sebagai negara industri di Asia selalu berusaha untuk meningkatkan nilai ekspornya, disamping juga berusaha untuk meningkatkan investasi, khususnya investasi secara langsung ke negara-negara lain dalam rangka untuk mengembangkan lagi perdagangannya dan mengambil peluang-peluang yang ada atau yang tersedia di negara tuan rumah.

Negara Jepang dalam hal ekonomi tentunya sangat memberikan dukungan-dukungan bagi perusahaan-perusahaan yang ada untuk meluaskan lagi usahanya keluar negara, atau dengan kata lain melakukan penanaman modal. Salah satu bukti dukungan tersebut adalah dimana negara mendirikan suatu

organisasi yang dikenal dengan sebutan "JETRO" (*Japan External Trade Organization*) yaitu *Japanese Government Funded Organization*, yang berperan untuk meningkatkan lagi perdagangan diantara Jepang dengan negara-negara lainnya. Disamping itu, negara melalui JETRO memberikan dukungan terhadap usaha-usaha perusahaan untuk melakukan penanaman modal mulai dari perusahaan-perusahaan yang berukuran kecil, menengah, sampai kepada perusahaan yang besar, dengan berbagai cara, misalnya dengan mengadakan seminar-seminar dan juga memberikan informasi-informasi mengenai investasi asing untuk menarik minat perusahaan-perusahaan Jepang untuk memasuki dan melakukan FDI.

Pada bulan Nopember 2004 disela-sela pertemuan APEC, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan mitranya yaitu Perdana Menteri Jepang saat itu, Shinzo Abe sepakat untuk membahas kemungkinan pembentukan *Economic Partnership Agreement* (EPA). Sehubungan dengan persiapan pembicaraan antara pemerintah Indonesia dan Jepang dalam kerangka kerjasama tersebut, pemerintah telah memperkirakan Jepang akan meminta adanya keistimewaan berupa liberalisasi investasi. Liberalisasi investasi itu berarti Jepang akan memiliki keistimewaan untuk berinvestasi di segala bidang. Keistimewaan itu merupakan bagian dari proses negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar Jepang bisa melonggarkan proteksinya dalam bidang ekspor pertanian. Hal ini untuk memastikan bahwa kerangka kerjasama yang akan dilakukan adalah kerjasama yang saling menguntungkan sehingga mereka akan mencari kemungkinan yang paling menguntungkan.

Hasil pembicaraan kedua pemimpin tersebut ditindaklanjuti antara Menteri Perdagangan kedua pihak pada bulan Desember 2004. Sebagai langkah awal adalah diadakannya *Joint Study*, melalui *Joint Study Group Meeting* (JSG) sebanyak 3 kali pertemuan informal (Desember 2004-Juli 2005). Hasil JSG merekomendasi manfaat perlunya EPA antara kedua negara berupa *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA), yang kemudian diikuti

dengan seri perundingan/negosiasi sebanyak 6 (enam) putaran sejak Juli 2005 sampai dengan November 2006.¹¹

Pada akhir negosiasi tanggal 24 Nopember 2006 di Tokyo, kedua *Chief Negotiator*, Ambassador Soemadi DM Brotodiningrat dan Mr. Mitoji YABUNAKA menandatangani *Record of Discussion* yang mencakup persetujuan prinsip atas bagian-bagian utama dari 13 kelompok negosiasi dan menyepakati untuk melakukan finalisasi dari perjanjian sesegara mungkin.¹² Pada akhirnya, EPA Indonesia dan Jepang akhirnya ditandatangani kedua negara setelah hampir tiga tahun dibahas.¹³ Penandatanganan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan PM Jepang saat itu, Shinzo Abe, di Istana Negara, Jakarta, diharapkan bisa membuka era baru hubungan ekonomi Indonesia-Jepang.

Beberapa alasan yang mendasari Indonesia untuk menjalin kerjasama melalui EPA dengan Jepang, diantaranya adalah:

1. Jepang merupakan mitra dagang dan investor utama buat Indonesia, dan Indonesia adalah penerima terbesar ODA Jepang;
2. Akses Pasar untuk produk Indonesia ke pasar ekspor terbesar mewakili 20% dari ekspor yang ada, sedangkan Jepang merupakan sumber impor terbesar kedua bagi Indonesia (13%);
3. Peluang untuk mengirim tenaga kerja semi terampil;
4. EPA memberi kepastian akses pasar yang lebih preferensial dan luas dibandingkan dengan program seperti *Generalized System of Preferences* (GSP), dan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara lain yang telah memiliki perjanjian dengan Jepang seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di ASEAN; sedangkan Brunei dan Vietnam menyusul.

Tidak seperti perjanjian perdagangan bebas sebelumnya, IJ-EPA merupakan kerjasama perdagangan yang mencakup tidak hanya liberalisasi, namun juga sektor lainnya, antara lain jasa, investasi, energi dan sebagainya, yang tercakup dalam tiga pilar utama yaitu:

¹¹ *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA); Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang*. <www.indonesianembassy.jp/perdagangan/manfaat_epa>. (diakses tgl 5 Oktober 2008).

¹² *Ibid.* p. 1

¹³ *EPA RI-Jepang Atasi Hambatan Nontarif*. Republika. Selasa, 21 Agustus 2007. <http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/08/news_7203.html>, (diakses tgl 18 Desember 2008)..

- a. Fasilitasi Perdagangan dan investasi, diantaranya:
- Upaya bersama untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan tingkat kepercayaan bagi investor Jepang;
 - Kerjasama di bidang prosedur kepabeanan, pelabuhan dan jasa-jasa perdagangan, HKI, standar;
- b. Liberalisasi: menghapuskan/mengurangi hambatan perdagangan dan investasi (bea masuk, memberi kepastian hukum);
- c. Kerjasama: kesepakatan untuk kerjasama dalam meningkatkan kapasitas Indonesia sehingga lebih mampu bersaing dan memanfaatkan secara optimal peluang pasar dari EPA.

IJ-EPA merupakan kerjasama yang komprehensif dan lebih memberikan peluang daripada kesepakatan dalam WTO, sehingga sering disebut dengan WTO PLUS. Untuk mengakomodasi ke-komprehensifan dan memperlancar jalannya perundingan, maka IJ-EPA mengelompokkan perundingan ke dalam 13 *Expert Groups* (EG), yaitu:¹⁴

1. *Trade in Goods*
2. *Customs Procedures*
3. *Rules of Origin*
4. *Investment*
5. *Improvement of Business Environment & Promotion of Business Confidence*
6. *Trade in Services*
7. *Movement of Natural Persons*
8. *Energy and Mineral Resources*
9. *Intellectual Property Rights (IPR)*
10. *Competition Policy*
11. *Technical Cooperation and Capacity Building*
12. *General Provisions*
13. *Government Procurement*

Dengan adanya perjanjian kerjasama IJ-EPA, Indonesia akan memperoleh beberapa keuntungan dan manfaat, antara lain:

¹⁴ *Ibid.* p.2.

- a. Kemitraan dalam EPA menggambarkan kepentingan dari kedua negara yang mengikatkan diri;
- b. Manfaat dari EPA, antara lain di bidang perdagangan: barang dan jasa; di bidang investasi dan bisnis; peningkatan kapasitas bagi Indonesia

Selain hal tersebut diatas, terdapat elemen Utama EPA yang penting bagi Indonesia yaitu peningkatan akses pasar produk ekspor Indonesia ke Jepang dan kerjasama dalam peningkatan kapasitas untuk memperbaiki daya saing Indonesia sehingga keuntungan dari EPA optimal bagi Indonesia. Keuntungan itu setidaknya dapat diraih oleh sebanyak mungkin lapisan masyarakat, termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM);

Selain itu dengan adanya EPA Indonesia memiliki beberapa kepentingan, yaitu:

- a. EPA dapat meningkatkan investasi dari Jepang;
- b. EPA akan meningkatkan kapasitas daya saing Indonesia secara umum maupun di sektor-sektor tertentu, antara lain:
 1. Peningkatan kapasitas, khususnya di area standardisasi produk dan pengujian; kebersihan dan standar kesehatan untuk produk makanan dan minuman;
 2. Pelatihan ketrampilan dan teknologi di sektor manufaktur yang akan meningkatkan mutu produk Indonesia di pasar domestik dan internasional;
 3. Program-program peningkatan kapasitas di bidang energi, industri, pertanian, promosi ekspor dan investasi dan pengembangan UKM;

Sebaliknya, Jepang juga memiliki beberapa kepentingan dengan adanya EPA, antara lain karena:

1. Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dan secara ekonomi, politik dan geografi adalah penting dan strategis;
2. Transparansi dan kepastian hukum untuk investasi, termasuk untuk investasi yang sudah ada.

Selain pada kerjasama melalui EPA, pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk membentuk forum kerja sama investasi (*Indonesia-Japan Joint Forum on Investment*). Forum ini merupakan tindak lanjut pertemuan pemimpin kedua negara yaitu Presiden SBY dan Perdana Menteri Jepang, Junichiro Koizumi beberapa waktu lalu. Pada 14 Maret 2005, Duta Besar Jepang untuk Indonesia

pada saat itu, Yutaka Iimura usai bertemu dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, mengemukakan bahwa tujuan dari forum tersebut adalah untuk meningkatkan investasi perusahaan swasta Jepang di Indonesia. Menurut Iimura, investasi Jepang sangat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, investasi ini membantu hubungan bilateral kedua negara.¹⁵

Dalam pertemuan antara pihak Jepang dan Indonesia, telah disepakati untuk membentuk kelompok kerja (*working group*). Forum kerja sama ini terdiri dari empat kelompok kerja, yaitu pajak dan bea cukai, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan daya saing. Anggota kelompok kerja itu berasal dari Indonesia dan Jepang yang akan melibatkan pengusaha kedua negara. Pertemuan juga telah menyepakati struktur dan rencana yang dilaksanakan masing-masing komite dan dilakukan evaluasi pada Mei 2005. Namun, pembicaraan dalam pokja tersebut belum menentukan rencana investasi secara langsung. Iimura hanya mengatakan, forum ini secara tidak langsung akan membantu pembicaraan Economic Partnership Agreement pada April 2005 di Jepang. Pembicaraan kerjasama ekonomi ini memasuki putaran ketiga. Kerjasama ekonomi itu akan diperluas, tidak terbatas hanya pada bidang perdagangan, tapi juga bidang-bidang lainnya seperti turisme dan investasi.

Dalam bidang kerjasama energi, *Indonesia-Japan Energy Round Table* keempat telah diselenggarakan oleh *Asia-Pacific Energy Forum* di tahun 2003 lalu. Dalam forum ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, mengatakan bahwa peningkatan kerjasama di sektor energi antara Indonesia dengan Jepang atas azas manfaat bersama, akan memastikan efektifitas upaya untuk mengatasi permasalahan pengamanan di sektor energi. Menteri Purnomo juga menambahkan bahwa kerjasama bilateral di sektor energi juga akan sangat berharga dalam menjawab masalah efisiensi ekonomi dan lingkungan dari kedua negara.¹⁶

Jepang saat ini masih merupakan importir batubara, minyak dan LNG terbesar dari Indonesia. Dalam kaitannya dengan hal ini, Indonesia secara terus

¹⁵ <<http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2005/03/14/brk,20050314-83,id.html>>, (diakses pada 20 September 2008)

¹⁶ <http://www.esdm.go.id/mesdm/index.php?option=com_content&view=article&id=1253:peningkatan-kerjasama-energi-indonesia-jepang&catid=1:mesdm&Itemid=53>, (diakses pada tgl 13 Mei 2008)

menerus melakukan upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia kepada pengusaha Jepang khususnya disektor minyak, gas bumi dan batubara. Kesempatan investasi di sektor minyak dan gasbumi di Indonesia dengan cadangan sumber daya serta pasar energi yang sangat besar menawarkan berbagai keuntungan potensial bagi Jepang termasuk untuk memenuhi pasar Jepang.

Dipihak lain, Jepang memiliki keunggulan dalam teknologi tinggi termasuk disektor energi antara lain teknologi eksplorasi dan *processing*. Oleh sebab itu masuknya investasi Jepang disektor energi tidak hanya akan memberikan manfaat secara ekonomis tetapi juga merupakan kesempatan alih teknologi tinggi. Karena itu upaya maupun inisiatif apapun yang dapat mempererat kerjasama bilateral di sektor energi antara Indonesia dan Jepang terutama di bidang eksplorasi dan produksi, perdagangan, investasi industri migas seperti LNG, infrastruktur gas alam, batu bara dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) sangat disambut baik oleh pihak pemerintah, dan bahkan selayaknya terus ditingkatkan.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut diatas, penyehatan ekonomi bersamaan dengan pelaksanaan restrukturisasi energi, telah berhasil menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi di Indonesia terutama di sektor migas dan ketenagalistrikan. Dalam hubungannya dengan hal ini, sangat dirasakan bahwa mempererat kerjasama bilateral di sektor energi antara Indonesia dengan Jepang juga akan memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam mempertahankan momentum yang sudah cukup baik ini.

IV. 2 Usaha Meningkatkan Investasi Jepang Melalui Badan ASEAN

Hal yang dapat diwujudkan melalui investasi tidak hanya berlaku bagi wilayah Indonesia saja, tetapi juga pada wilayah ASEAN, mengingat Indonesia sebagai salah satu anggota perkumpulan negara-negara Asia Tenggara tersebut. Negara investor juga diharapkan dapat terus meningkatkan investasinya ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sebagai upaya ikut mempercepat pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing negara.

Sebelum melangkah pada usaha peningkatan investasi melalui kerjasama

ASEAN, di bagian berikut akan terlebih dahulu dijabarkan hubungan perdagangan antara Jepang dan ASEAN.

Negara-negara Asia Timur disebutkan mengadopsi kebijakan yang berorientasi kepada asumsi adanya keterkaitan antara perdagangan dan investasi. Demikian pula halnya dengan Jepang, terlihat bahwa investasi merupakan salah satu instrumen untuk mendukung perdagangan internasionalnya.

Satu hal yang menunjukkan strategi Jepang dalam hubungan ekonomi-politik internasionalnya adalah karakter interkoneksi antara perdagangan, bantuan, dan investasi. Ketiga hal inilah yang menjadi pilar dalam hubungan ekonomi Jepang dengan negara lain, dalam hal ini, terutama ASEAN.

Pada periode tahun 1950-1960, bantuan merupakan elemen penting dalam perbaikan hubungan perdagangan dan investasi Jepang dengan negara-negara Asia Tenggara. Penanaman investasi memungkinkan perusahaan Jepang untuk menekan biaya produksi, sehingga produknya dapat lebih bersaing di pasar internasional. Sebaliknya, FDI membawa implikasi pembelian alat-alat atau teknologi yang mendukung proses produksi di host countries.

Dengan semakin tingginya intensitas pergerakan barang dan kapital secara lintas-batas, maka perdagangan dan investasi menjadi sangat terkait satu sama lain. Pada prakteknya, hubungan perdagangan antara Jepang dan ASEAN tidak dapat dipisahkan dari investasi karena investasi merupakan salah satu upaya untuk mendukung industri, dan tentunya perdagangan Jepang.

Dalam dinamika perdagangan, Hubungan Jepang-ASEAN dapat dilihat melalui tiga periode, yaitu periode 1950-1971, 1971-1990, dan 1990-2003. Pada periode pertama, Jepang melakukan ekspansi perdagangan secara besar-besaran sebagai upaya memperbaiki kondisi perekonomiannya pasca kehancuran akibat Perang Pasifik (Perang Dunia II). Pada periode kedua, terjadi peningkatan arus FDI Jepang yang sangat signifikan, sebagai upaya untuk mendukung perdagangannya. Sedangkan pada periode ketiga, resesi ekonomi Jepang dan krisis ekonomi Asia menjadi momen yang penting dalam mempengaruhi hubungan perdagangan Jepang, dalam hal ini, khususnya dengan negara-negara ASEAN.

Jepang ingin menjadikan ASEAN sebagai kawasan perdagangan bebas

guna meningkatkan pamor ekonomi dan politiknya di Asia. Bagi Jepang, ASEAN dipandang sebagai kunci pertumbuhan ekonomi, tujuan investasi, pangsa pasar, dan perdagangan yang sangat menjanjikan. Sehingga, pada perkembangan selanjutnya, setelah ASEAN-Cina di tahun 2001 sepakat untuk membangun kawasan perdagangan bebas dalam 10 tahun mendatang, kini Jepang tidak ingin kehilangan ASEAN dari Cina yang sudah lebih dulu merangkul ASEAN.

IV.2.1. Hubungan Perdagangan Jepang-ASEAN pada Masa Stagnansi Ekonomi Jepang dan Krisis Ekonomi Asia

Stagnansi ekonomi yang dialami oleh Jepang pasca “*bubble economy*” mendorong untuk mengurangi impor barang modal dan bahan-bahan baku, dan secara simultan meningkatkan ekspor ke negara-negara ASEAN yang pada saat itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk dapat melihat lebih jelas dinamika perdagangan antara Jepang dan ASEAN, akan disajikan tabel *volume* perdagangan Jepang-ASEAN.¹⁷

Tabel IV.1
Perdagangan Jepang-ASEAN (100 Juta Yen)

	1993	1994	1995	1996	1997
Total	95,167	102,756	118,544	137,102	145,289
Ekspor	55,879	62,546	73,058	79,931	84,600
Impor	39,288	40,211	45,486	57,171	60,688
	1998	1999	2000	2001	2002
Total	112,831	114,320	138,050	131,963	134,348
Ekspor	60,904	61,723	73,812	65,922	69,698
Impor	51,927	52,598	64,238	66,041	64,650

Sumber: The Summary Report, Trade of Japan (Japan Tariff Association)

¹⁷ *Ibid.* p. 41.

Terlihat pada tabel diatas, bahwa stagnansi ekonomi Jepang tidak lantas menurunkan intensitas perdagangan Jepang-ASEAN. Penurunan *volume* perdagangan justru lebih dipengaruhi oleh terjadinya krisis ekonomi. *Volume* perdagangan Jepang-ASEAN mengalami penurunan sebesar 22 persen dari tahun 1997 ke 1998. Meskipun sempat meningkat secara signifikan dari tahun 1999-2000, perdagangan Jepang-ASEAN menjadi cenderung stagnan, Demikian juga dengan ekspor Jepang ke ASEAN.

Cenderung stagnannya ekspor Jepang ke ASEAN selama beberapa tahun terakhir, membuat Jepang tentunya berharap banyak kepada perusahaan-perusahaan afiliasinya di negara-negara ASEAN. Dengan kata lain, Jepang melihat investasi sebagai alternatif untuk menggalakkan produksinya. Pada periode stagnasi ekonomi Jepang dan krisis ekonomi, berlangsung gelombang ketiga ("*third wave*") FDI Jepang ke ASEAN. Pada gelombang ketiga ini, ASEAN dan Cina menjadi sasaran investasi yang lebih diutamakan Jepang daripada NICs. Diantara negara-negara ASEAN sendiri, Indonesia dan Thailand merupakan penerima investasi Jepang yang terbesar. Selama periode tahun 1990-1995, Indonesia dan Thailand secara akumulatif menerima 54,4 persen FDI Jepang untuk sektor industri manufaktur ASEAN. Berikut ini tabel investasi Jepang ke ASEAN.¹⁸

Tabel IV.2

Investasi Jepang ke ASEAN (100 Juta Yen)

1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
3,548	5,306	5,363	7.201	9,613	5,214	4,450	2,804	4,528	2,709

Dari gambar tabel diatas, dapat dilihat bahwa investasi Jepang mengalami penurunan sejalan dengan jatuhnya "*bubble economy*". Penurunan ini berlangsung dari tahun 1990 ke 1993, akan tetapi investasi Jepang mengalami peningkatan sejak tahun 1994. Kondisi ini berbeda dengan perdagangan yang langsung kembali meingkat pada tahun 1999, nilai investasi Jepang ke ASEAN terus

¹⁸ *Ibid.*

mengalami penurunan dari tahun 1997 sampai dengan 2000. Peningkatan sempat dialami pada tahun 2001, namun investasi Jepang ke ASEAN kembali menurun di tahun 2002.

Peristiwa yang juga penting dicermati pada periode ini adalah di awal 1997 dimana saat itu Perdana Menteri Jepang Ryutaro Hashimoto mengeluarkan “Doktrin Hashimoto” yang intinya berisi bahwa Jepang melihat ASEAN sebagai rekanan yang seimbang. Doktrin ini dipandang sebagai pendekatan baru yang penting oleh Jepang terhadap ASEAN dan pengakuan Jepang akan dinamika kawasan tersebut. Selain itu, doktrin ini juga mendukung liberalisasi perdagangan dan investasi regional selanjutnya. Ini menunjukkan antusiasme Jepang untuk meningkatkan intensitas hubungan perdagangan dan investasi dengan ASEAN. Hal ini juga dapat dilihat sebagai indikasi kesadaran Jepang akan semakin berintegrasinya ASEAN, sehingga Jepang tidak ingin tertinggal dalam proses liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan.

Melihat dinamika perdagangan Jepang-ASEAN dari periode ke periode, investasi emjadi hal yang tidak terpisahkan didalamnya. Ada keterkaitan antara gelombang investasi langsung Jepang, dengan konteks perdagangan yang tengah berlangsung antara Jepang dengan ASEAN. Demikian pula halnya pada masa stagnansi ekonomi Jepang dan krisis ekonomi Asia, kepentingan Jepang untuk mengelola surplus perdagangan dengan ASEAN didukung oleh investasi Jepang ke ASEAN. Dengan kebutuhan perusahaan afiliasi Jepang akan barang modal dan teknologi, Jepang dapat mengelola ekspor barang modal dan teknologinya ke ASEAN.

Menanggapi krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi di Asia tersebut, negara-negara ASEAN sepakat untuk menegaskan kembali komitmennya melalui suatu tindakan konkrit yang dilakukan bersama dan tentunya secara terpadu. Komitmen ini diwujudkan berdasarkan pada keinginan negara-negara ASEAN dalam rangka menciptakan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di kawasan ASEAN. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ASEAN Vision 2020. Sejalan dengan visi ASEAN yang berorientasi keluar sebagaimana tertera dalam ASEAN Vision 2020, hubungan ASEAN dengan mitra wicara dan organisasi regional lainnya seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI), Uni Eropa dan yang lainnya

perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, Indonesia memandang bahwa upaya untuk keluar dari krisis akan lebih mudah tercapai dengan upaya menyertakan negara-negara mitra wicara untuk ikut membantu memulihkan perekonomian dan mencari jalan untuk keluar dari krisis tersebut. Tentu saja ini tidak saja bagi Indonesia, namun juga bagi kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.

Selain langkah tersebut diatas, salah satu cara alternatif yang dapat dipergunakan untuk memulihkan perekonomian Indonesia adalah dengan meningkatkan kerjasama perdagangan dan juga investasi Indonesia dengan tiga negara mitra wicara ASEAN yaitu Cina, Jepang, dan Korea Selatan atau yang dikenal dengan “Kerjasama ASEAN+3”. Kerjasama ASEAN+3 tersebut disamping telah menciptakan suatu lapisan atau *community building* yang memiliki penekanan lebih di tatanan global maupun inter-regional, Selain itu, mampu mempengaruhi pula mekanisme keseimbangan kekuatan regional.¹⁹

Kawasan Asia Timur masih tetap dipandang sebagai kawasan yang paling dinamis di dunia. Di tengah friksi dan tekanan tajam antar sesama negara industri maju serta terpuruknya kinerja perekonomian di banyak negara berkembang di kawasan Amerika Latin dan Afrika, perekonomian negara-negara di Asia Timur terus maju, yang terutama intensitas arus perdagangan dan investasi. Di Asia Timur sendiri telah tercipta suatu landasan yang kokoh untuk menjalankan perekonomian dengan kecepatan yang relatif stabil atau tinggi.

IV.2.2 Kerjasama ASEAN- Jepang Untuk Meningkatkan Investasi Jepang Ke Indonesia

Untuk meningkatkan arus investasi langsung, baik yang berasal dari negara-negara ASEAN maupun non-ASEAN, negara-negara ASEAN telah sepakat untuk membentuk kawasan investasi ASEAN (ASEAN-AIA). *Framework Agreement* pada AIA telah ditandatangani di Manila tanggal 7 Oktober 1990, yaitu tepatnya dalam sidang ke-30 para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM-30).

ASEAN sebagai salah-satu sarana bagi perwujudan kepentingan ketahanan ekonomi nasional mempunyai peluang-peluang yang terbuka untuk dimanfaatkan

¹⁹ *Ibid.* p. 17

berkaitan dengan perluasan jaringan ekonomi yang terorganisasikan melalui program-program ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) dan AIA. Salah-satu kesempatan penting dari perluasan jaringan ekonomi antar kawasan yang terus meningkat adalah kerjasama FTA ASEAN-Jepang yang telah berlangsung sejak ASEAN-*Japan Closer Economic Partnership* (AJCEP) pada tahun 2002.

Usaha untuk meningkatkan arus investasi Jepang memang dibuat secara bertahap dan tanpa henti. Pada bulan Oktober 2003, pemerintah Jepang dan sepuluh negara anggota ASEAN menandatangani kerangka utama bilateral persetujuan atas perdagangan bebas. Selain itu, Pertemuan puncak ASEAN-Jepang (*Commemorative Summit*) yang berlangsung di Tokyo, Desember 2003 dalam rangka peringatan hubungan ASEAN-Jepang ke-30 tahun telah mengeluarkan dokumen penting berjudul "*Tokyo Declaration for a Dynamic and Enduring ASEAN-Japan Partnership in the New Millennium*". Bagi ASEAN dan Jepang, dokumen ini mempunyai nilai strategis bagi hubungan kedua pihak. Kemudian di November 2004, para anggota setuju untuk memprakarsai proses negosiasi. Pembicaraan ini dimulai secara formal pada April 2005, dengan perencanaan penyelesaian di tahun 2009. Bagi pemerintah Jepang, FTA menjadi target penting untuk mencapai posisi yang lebih kuat di Asia diantara Cina, Korea, dan Amerika.

Bagi hampir seluruh negara di kawasan ASEAN, Jepang merupakan satu mitra terbesar dalam ekonomi khususnya di bidang investasi. AJCEP sebagai pintu masuk pada *Economic Partnership Agreement* (EPA) antara Indonesia dengan Jepang adalah peluang penting bagi pembangunan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki Jepang yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui hubungan bilateral yang lebih erat sehingga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Besarnya investasi yang mengalir ke ASEAN telah diketahui secara luas. Setelah mengalami stagnansi pada tahun 1992 dan 1993, investasi di ASEAN meningkat dengan cepat. Negara-negara ASEAN dengan penghasilan menengah seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina kini tengah menghadapi tantangan utama untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik mereka sebagai tuan rumah bagi investasi dalam lingkungan ekonomi yang berubah dengan pesat.

Investasi) di negara-negara anggota ASEAN naik 48% menjadi 38 miliar dolar AS di tahun 2005, tetapi masih berada di belakang Cina.²⁰ Investasi ke ASEAN tahun 2005, terlihat sudah melampaui pencapaian saat krisis keuangan Asia tahun 1997, ketika puncaknya sempat mencapai 34 miliar dolar AS. Sumber investasi utama ke ASEAN selama 2005 berasal dari Amerika Serikat (AS), Inggris, Jepang, Perancis dan Finlandia. Sekitar 79% dari FDI tahun lalu adalah dalam bentuk jasa keuangan seperti asuransi, manufaktur, perdagangan, katanya. Ditambahkan bahwa pertambangan dan bahan galian adalah sektor lain yang juga mengalami peningkatan investasi.

Data awal investasi untuk triwulan pertama tahun 2006 yang dikeluarkan oleh dewan investasi ASEAN mengindikasikan bahwa ada kenaikan sebesar 90% menjadi 14 miliar dolar dari 7,4 miliar dolar pada periode sama tahun sebelumnya. Dalam perkembangannya, kerjasama ekonomi antara Jepang dan ASEAN telah memunculkan konsekuensi logis berupa peningkatan interdependensi antara Jepang dan ASEAN. Peningkatan interdependensi ini merupakan salah satu kondisi yang mendorong Jepang ke arah institusionalisasi liberalisasi perdagangan dengan ASEAN.

²⁰ Menteri Perdagangan Malaysia, Rafidah Aziz, pada pertemuan ekonomi regional, 21 Agustus 2006, <http://www.globaljust.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=87>, (diakses 4 Agustus 2008).